

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI JAYAPURA

NOMOR HK.02.02.21A.12.25.127 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI JAYAPURA TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. Acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan

b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada Tanggal 5 Desember 2025
KEPALA BALAI BESAR POM DI JAYAPURA,



HERIANTO BAAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jayapura Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renstra ini merupakan pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Jayapura selama lima tahun ke depan, sejalan dengan arah kebijakan nasional dan program prioritas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan pengukuran capaian kinerja organisasi.

Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, maka setiap instansi pemerintahan diwajibkan untuk menyusun rencana strategis (Renstra). Balai besar POM di Jayapura menyusun Renstra dengan mengacu pada Visi, Misi dan Rencana Strategis Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Rencana strategis (Renstra) Balai Besar POM di Jayapura merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan faktor internal maupun faktor eksternal, antara lain: kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Rencana Strategis berisi upaya-upaya pembangunan Pengawasan Obat dan Makanan yang dijabarkan dalam bentuk Program/Kegiatan, Indikator, Target sampai dengan Kerangka Pendanaan. Rencana strategis Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2025-2029 digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dalam kurun waktu 2025-2029, serta dilaksanakan oleh seluruh pegawai di Balai POM di Jayapura.

Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Pembangunan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Permintaan akan sediaan farmasi dan pangan olahan yang semakin meningkat dan maraknya penjualan barang secara online dan pasar bebas berdampak pada meningkatnya tantangan penyelenggaraan Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dan tugas pengawasan sediaan

farmasi dan pangan olahan untuk melindungi masyarakat terhadap resiko gangguan kesehatan akibat konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat. Sejalan dengan meningkatnya tantangan dan tanggungjawab maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura terus meningkatkan efektivitasnya melalui pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang ada secara optimal untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Untuk menjamin perlindungan kepada masyarakat maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura bekerjasama dengan para pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah untuk memperoleh dukungan yang akan menjamin kelancaran pelaksanaan semua program dan kegiatan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Harapan kami, dokumen Renstra ini dapat menjadi instrumen perencanaan yang efektif dan mendorong peningkatan kinerja BBPOM di Jayapura secara berkelanjutan.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima dan perlindungan masyarakat di bidang obat dan makanan.

DITETAPKAN DI JAYAPURA
PADA TANGGAL 5 DESEMBER 2025
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI JAYAPURA



Herianto Baan, S.Si., Apt

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vii
I.1. Kondisi Umum.....	1
I.1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2020 - 2024	3
1. Sasaran Kegiatan (SK1) yaitu Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT.....	10
2. Sasaran Kegiatan (SK2) yaitu Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan.....	12
3. Sasaran Kegiatan (SK3) yaitu Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan	13
4. Sasaran Kegiatan (SK4) yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	15
5. Sasaran Kegiatan (SK5) yaitu Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	19
6. Sasaran Kegiatan (SK6) yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21
7. Sasaran Kegiatan (SK7) yaitu Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	22
8. Sasaran Kegiatan (SK8) yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	23
9. Sasaran Kegiatan (SK9) yaitu Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	24
10. Sasaran Kegiatan (SK10) yaitu Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan.....	25
11. Sasaran Kegiatan (SK11) yaitu Terkelolanya keuangan UPT secara Akuntabel	26
I.1.2 Aspirasi <i>Stakeholder</i>	27
I.2 Potensi dan Permasalahan	28
I.2.1 Kekuatan (<i>Strength</i>)	28
I.2.2 Kelemahan (<i>Weakness</i>)	37

I.2.3 Peluang (<i>Opportunity</i>)	45
I.2.4 Ancaman (<i>Threat</i>).....	51
2.1 Visi	61
2.2 Misi BPOM.....	62
2.3 Tujuan BPOM.....	64
2.4 Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Jayapura	67
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM	91
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Jayapura.....	95
IV.1 Target Kinerja.....	99
4.2 Kerangka Pendanaan	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai POM di Jayapura	2
Gambar 1. 2 Capaian Kinerja Balai Besar POM Jayapura	4
Gambar 1. 3 Tren Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2020-2024.....	10
Gambar 1. 4 Tren Persentase Makanan yang memenuhi syarat Tahun 2020-2024	11
Gambar 1. 5 Tren Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasn Tahun 2020-2024	11
Gambar 1. 6 Tren Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020-2024	11
Gambar 1. 7 Tren Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2021-2024	12
Gambar 1. 8 Tren Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Tahun 2020-2024.....	13
Gambar 1. 9 Tren Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.....	14
Gambar 1. 10 Tren Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024	14
Gambar 1. 11 Tren Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT Tahun 2020-2024	14
Gambar 1. 12 Tren Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2020-2024	16
Gambar 1. 13 Tren Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2020-2024	16
Gambar 1. 14 Tren Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020-2024	16
Gambar 1. 15 Tren Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2020-2024	17
Gambar 1. 16 Tren Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2020-2024	17
Gambar 1. 17 Tren Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020-2024.....	17
Gambar 1. 18 Tren Persentase UMKM yang memenuhi standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik Tahun 2020-2024	18
Gambar 1. 19 Tren Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.....	19

Gambar 1. 20 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman Tahun 2020-2024	19
Gambar 1. 21 Tren Jumlah desa pangan aman Tahun 2020-2024Tren Jumlah desa pangan aman Tahun 2020-2024	20
Gambar 1. 22 Tren Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya Tahun 2020-2024.....	20
Gambar 1. 23 Tren Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020-2024	21
Gambar 1. 24 Tren Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020-2024	21
Gambar 1. 25 Tren Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2020-2024	22
Gambar 1. 26 Tren Indeks RB UPT Tahun 2020-2024	23
Gambar 1. 27 Tren Nilai AKIP UPT Tahun 2020-2024	24
Gambar 1. 28 Tren Indeks Profesionalitas UPT Tahun 2020-2024.....	25
Gambar 1. 29 Tren Persentase pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2020-2024	26
Gambar 1. 30 Tren Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal Tahun 2020-2024.	26
Gambar 1. 31 Tren Nilai Kinerja Anggaran UPT Tahun 2020-2024.....	27
Gambar 1. 32 Data distribusi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM)	33
Gambar 1. 33 Grafik Peningkatan Jumlah UMKM yang Telah Didampingi	51
Gambar 1. 34 Matriks Ringkasan Analisis SWOT	60
Gambar 2. 1 Misi Presiden (Asta Cita)	62
Gambar 2. 2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan BPOM 2025-2029.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2020-2024	5
Tabel 1. 2 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis.....	9
Tabel 1. 3 Tabel Klasterisasi Saran, Feedback dan Masukan	27
Tabel 1. 4 Jumlah pegawai Balai Besar POM di Jayapura Per jabatan Fungsional.	32
Tabel 2. 1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029.....	66
Tabel 2. 2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai Besar POM di Jayapura periode 2025-2029.....	72
Tabel 2. 3 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan BBPOM di Jayapura	76
Tabel 3. 1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029	94
Tabel 3. 2 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Jayapura 2025-2029.....	97
Tabel 4. 1 Matriks Kerangka Kinerja Balai Besar POM di Jayapura 2025-2029	99
Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan BBPOM di Jayapura 2025-2029	102
Tabel 4. 3 Tabel kerangka pendanaan BBPOM di Jayapura 2025-2029 Berdasarkan sumber dana	103

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Kondisi Umum

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan Obat dan makanan yang beredar di Provinsi Papua aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat.

Tugas, fungsi, dan kewenangan UPT BPOM diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Berdasarkan peraturan tersebut UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Selain, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana Peraturan Kepala BPOM Nomor 19 Tahun 2023, seluruh Kementerian/Lembaga termasuk BPOM diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.

Balai POM di Jayapura sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender BPOM turut mendukung implementasi PUG di seluruh kegiatannya. Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM di Jayapura disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023. Adapun struktur organisasi Balai POM di Jayapura tersebut dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai POM di Jayapura

Balai Besar POM di Jayapura hadir dan melayani agar masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Hal ini memiliki dampak pada peningkatan kesehatan masyarakat. Cakupan wilayah yang harus diawasi oleh BBPOM di Jayapura dengan luas wilayah kurang lebih 420.540 km² yakni terdiri dari 20 kabupaten/kota (tahun 2020 - 2022), dan menjadi 17 Kabupaten/kota sejak tahun 2023 dengan adanya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dimana Provinsi Papua dipecah menjadi 3 (tiga) Provinsi baru yaitu Provinsi Papua Selatan berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2022; Provinsi Papua Tengah berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2022 ; dan Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2022

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Jayapura menghadapi tantangan dengan adanya kondisi demografi Provinsi Papua yang sebagian besar merupakan wilayah pegunungan, kondisi keamanan yang terkadang tidak kondusif, transportasi dan jaringan internet yang terbatas sehingga jangkauan KIE masih terbatas ke semua daerah/kabupaten namun telah dilakukan upaya semaksimal mungkin. Untuk merespon tantangan yang dihadapi Balai Besar POM di Jayapura berkolaborasi dengan lintas sektor seperti K/L, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, pelaku usaha dan masyarakat. Dengan adanya tantangan yang dihadapi menuntut Balai Besar POM di Jayapura untuk terus mencari solusi agar harapan masyarakat dapat terpenuhi serta melakukan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan makanan di seluruh Provinsi Papua.

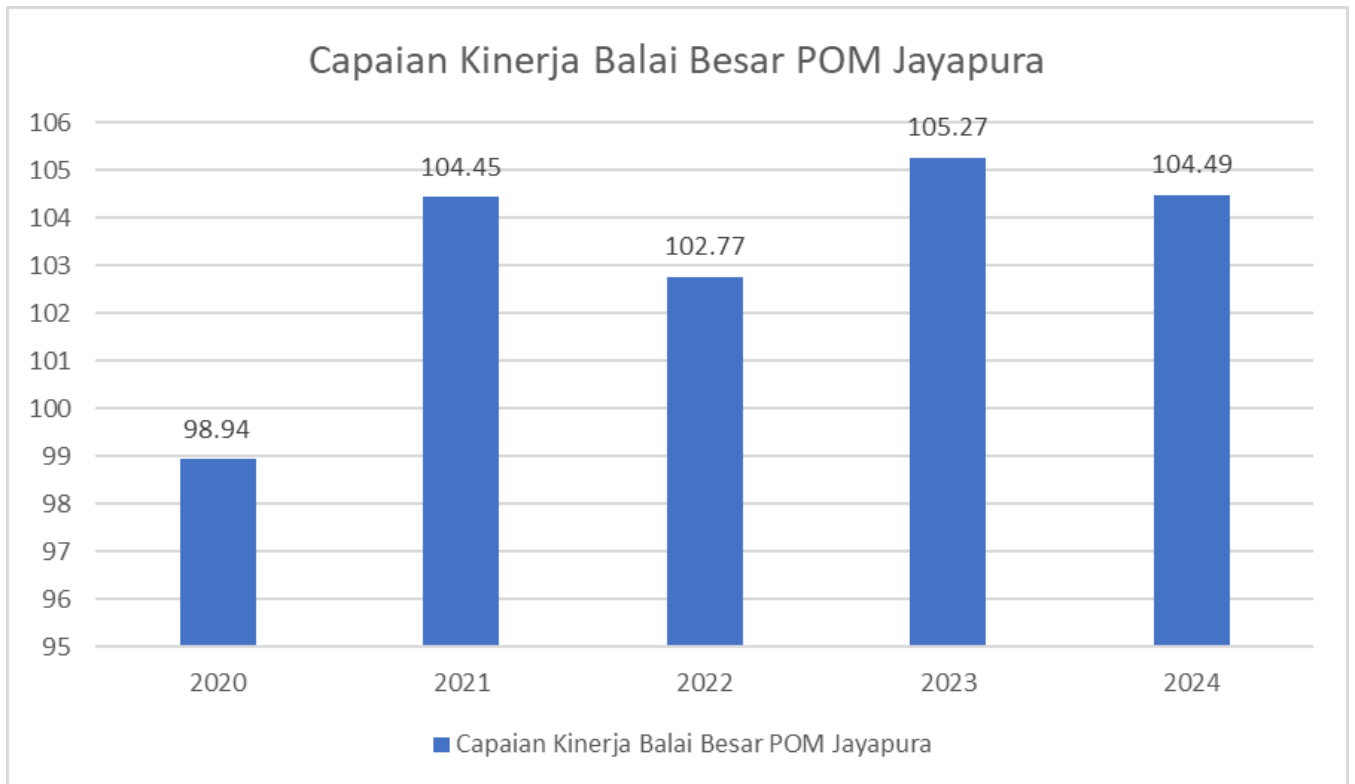
Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman bagi Balai Besar POM di Jayapura dalam mencapai visi dan misinya selama lima tahun ke depan dan juga dalam menjawab tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan Obat dan makanan. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan mengacu pada berbagai kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan demikian, diharapkan Renstra ini dapat menjadi pedoman bagi organisasi untuk mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai kinerja yang optimal serta berkontribusi pada pembangunan nasional yang berkelanjutan.

I.1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2020 - 2024

Pencapaian kinerja organisasi disajikan dari hasil pengukuran capaian kinerja Balai Besar POM di Jayapura tahun 2020-2024 yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Selama periode tahun 2020-2024, capaian kinerja Balai Besar POM di Jayapura bersifat fluktuatif. Capaian tertinggi ada pada tahun 2023 sebesar 105.27 dan terendah pada tahun 2020 sebesar 98.94, sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



Gambar 1. 2 Capaian Kinerja Balai Besar POM Jayapura

Tabel 1. 1 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2020-2024

Kode	IKU	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK.1	Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT															
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,07	102,81	83,6	81,42	97,39	86,6	93,64	108,13	90	93,36	103,73	93,5	94,42	100,98
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	78,49	100,63	78,5	85,17	108,50	82	82,19	100,23	84	89,12	106,10	91	83,33	91,57
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	86,6	106,92	87	80,45	92,47	90	92,96	103,29	91	93,18	102,40	93,5	93,51	100,01
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66	79,23	120,04	85	89,34	105,11	86	92,96	108,09	87	95,12	109,33	95,3	96,67	101,44
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat				88	94,17	107,01	89	86,4	97,08	90	100	111,11	97	100	103,09
SK.2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan															
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	72	60,85	84,51	64	72,57	113,39	68	65,8	96,76	71	66,56	93,75	67,5	74,09	109,76
SK.3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan															
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83,5	90,59	108,49	91,1	90,2	99,01	92,3	94,5	102,38	93,40	94,4	101,07	94,6	96,49	102,0
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	63,01	87,51	64,76	61,7	95,27	66,51	63,40	95,32	68,26	72,06	105,57	73	68,7	94,11
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88	88,20	100,23	89,50	91,76	102,53	90,50	89,4	98,78	91	90,04	98,95	90,5	91,96	101,61
SK.4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT															
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89,73	103,14	89	95,77	107,61	90	98,08	108,98	91	97,83	107,51	98	100	102,04
11	Persentase keputusan/rekomendasi	55	46,98	85,42	55	64,39	117,	57	58	101,	59	69,6	118,	70	89,1	127,41

Kode	IKU	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
	hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan						07			75		7	08		9	
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	92	108,24	92	100	108,70	94	100	106,38	95	99,76	105,01	99,8	100	100,20
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	48,75	105,98	55	53,49	97,25	60	66,2	110,33	65	70,83	108,97	71,5	76	106,29
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	76,40	138,91	76	73,33	96,49	79	79,40	100,51	82	82,29	100,35	85	85,61	100,72
15	Indeks Pelayanan Publik	3,51	4,08	116,24	4,20	4,33	103,10	4,4	4,24	96,36	4,25	4,72	111,06	4,8	4,83	100,63
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik							77	80	103,90	79	66,67	84,39	81	70	86,42
17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota													95	75,47	79,44
SK.5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT															
18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,95	89,63	103,08	90,5	93,31	103,10	92,2	93,33	101,23	94,1	94,99	100,95	95,8	97,43	101,70
19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	16	100	40	47	117,5	56	58	103,57	72	74	102,78	88	88	100
20	Jumlah desa pangan aman	4	4	100	8	8	100	13	13	100	17	17	100	22	22	100
21	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2	100	8	8	100	12	12	100	17	17	100	22	22	100
SK.6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT															
22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95	99,91	105,17	100	100,04	100,04	100	100,10	100,10	100	100	100	100	100	100

Kode	IKU	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	99,77	117,38	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SK.7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT															
24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	35	32,96	94,17	42	70,35	167,50	50	99	197	73	97	132,88	98	93,44	95,35
SK.8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal															
25	Indeks RB UPT	85	68,65	80,76	84,8	84,76	99,95	86,80	90,05	103,74	88,80	90,18	101,55	91,18	86,90	95,31
26	Nilai AKIP UPT	80	77,22	96,53	79,7	78,96	99,07	82,2	78,25	95,19	84,70	78,5	92,68	81,49	76,95	94,43
27	Nilai Pengelolaan Kearsipan													92,79	97,56	105,14
SK.9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal															
28	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75	83,44	111,25	84	84,93	101,11	84,40	85,40	101,18	84,8	90,7	106,96	91,08	86,88	95,39
SK.10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan															
29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79	66,8	84,56	72	74,10	102,92	77	80,2	104,16	82	81,58	99,49	83,7	86,58	103,44
30	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,51	1,575	104,30	2	2,025	101,25	2,25	2,9	128,88	2,5	2,9	116	3	3	100,0
SK.11	Terkelolanya keuangan UPT secara Akuntabel															
31	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	93	88,326	94,97	92,3	89,83	97,32	92,9	89,8	96,66	94,10	88,72	94,28	89,48	90,31	100,93
32	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	95	100	105,26	95	100	105,26									
33	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa													70	95	135,71
34	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara													85	98,1	115,52

Kode	IKU	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
															9	
35	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri													60	63,48	105,8

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja selama 5 (Lima) tahun diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yang merupakan kinerja dari Balai Besar POM di Jayapura mengalami peningkatan kinerja secara fluktuatif dari tahun 2020 ke tahun 2024, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 1. 2 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis

No	Tahun	NPSS (%)
1	2020	98,94
2	2021	104,45
3	2022	102,77
4	2023	105,27
5	2024	102,25

Pengukuran kinerja Balai Besar POM di Jayapura mengacu pada Sasaran Strategis yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Jayapura dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Jayapura. Dalam penyusunan sasaran strategis, Balai Besar POM di Jayapura menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) yang terbagi dalam 3 (tiga) perspektif yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Balai Besar POM di Jayapura sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu :

- Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup : perkuatan regulasi, peningkatan **registrasi/penilaian**, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi
- Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup : pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan
- Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi, informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor

untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan

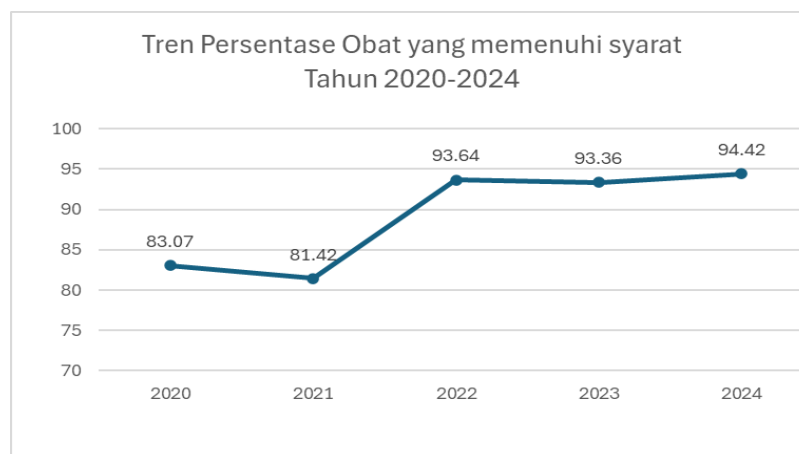
- d. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Balai Besar POM di Jayapura memiliki 11 Sasaran Kegiatan dan 30 Indikator Kinerja Utama. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan (SK1) yaitu Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT

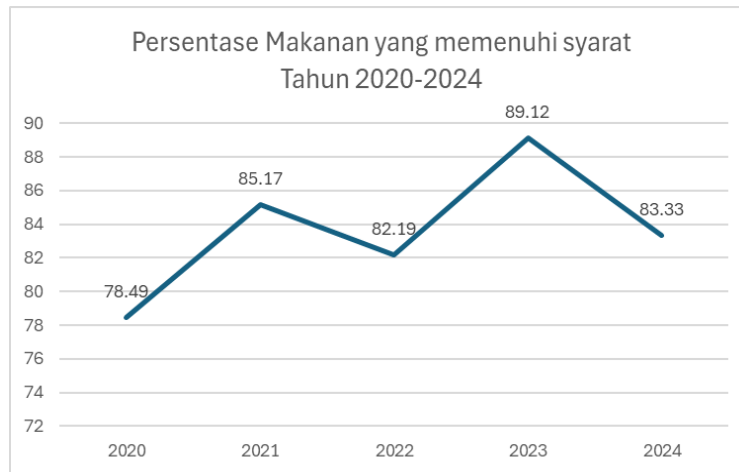
Balai Besar POM di Jayapura sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertugas memastikan bahwa obat dan makanan yang beredar di wilayah kerjanya memenuhi standar yang ditetapkan. Ini mencakup pengawasan terhadap obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat



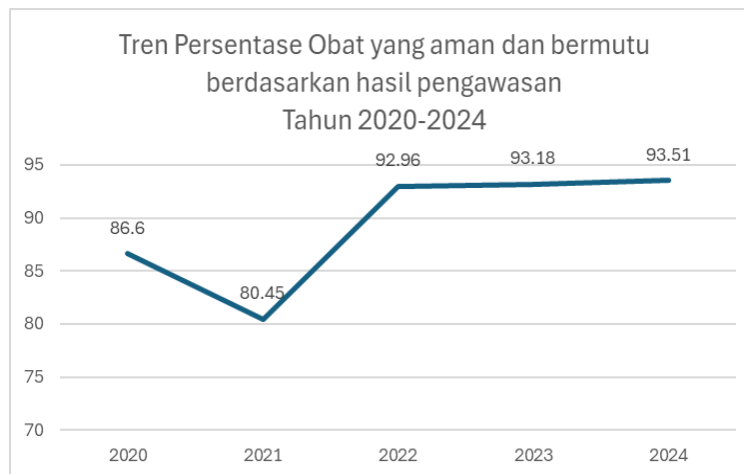
Gambar 1. 3 Tren Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2020-2024

- 2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat



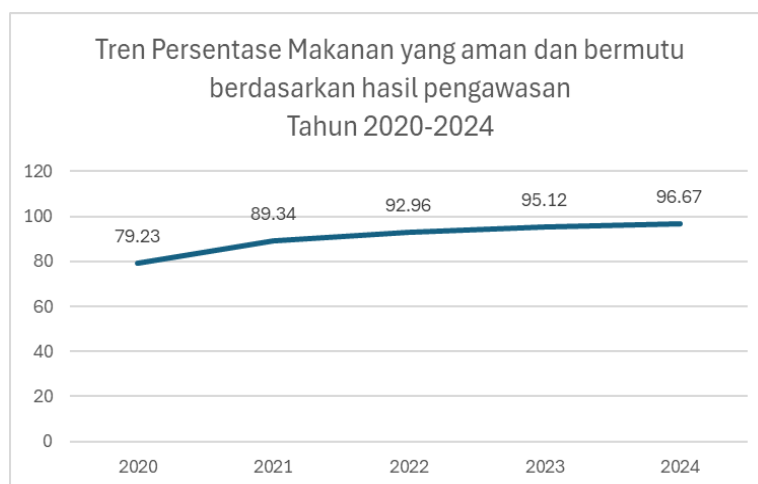
Gambar 1. 4 Tren Persentase Makanan yang memenuhi syarat Tahun 2020-2024

3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan



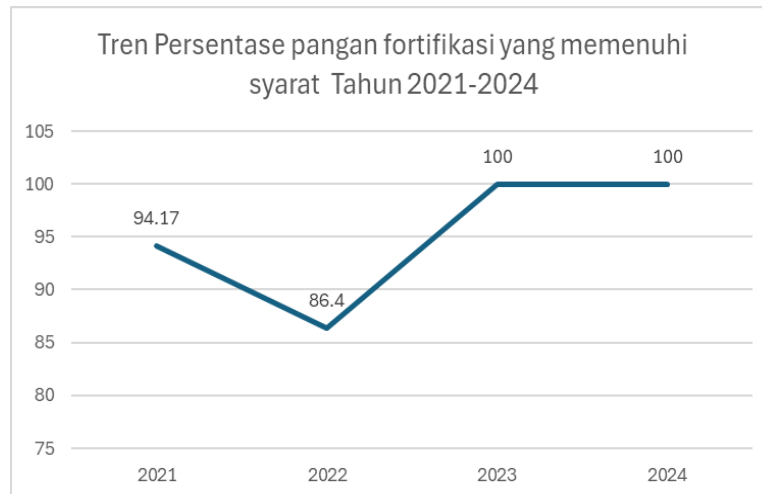
Gambar 1. 5 Tren Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020-2024

4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan



Gambar 1. 6 Tren Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020-2024

5) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat



Gambar 1. 7 Tren Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2021-2024

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK1 yaitu :

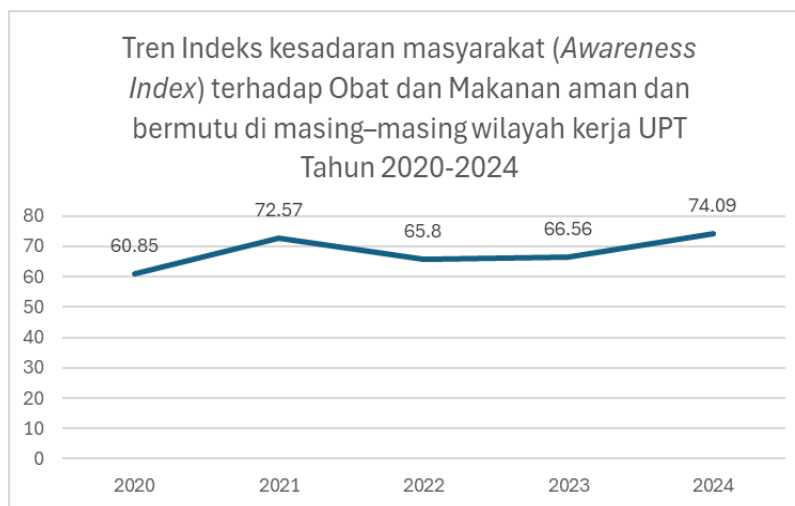
- Evaluasi penandaan sampel yang dilakukan mengikuti petunjuk teknis evaluasi penandaan sampel;
- Peningkatan kompetensi petugas sampling dan penguji;
- Melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman;
- secepatnya melakukan pengadaan terkait ketersediaan reagen, media, suku cadang serta peralatan laboratorium;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian secara berkala;
- Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan) untuk melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha agar membuat produk obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan sesuai standar.

- Sasaran Kegiatan (SK2) yaitu Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator

Kinerja Utama sebagai berikut :

- 1) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu.

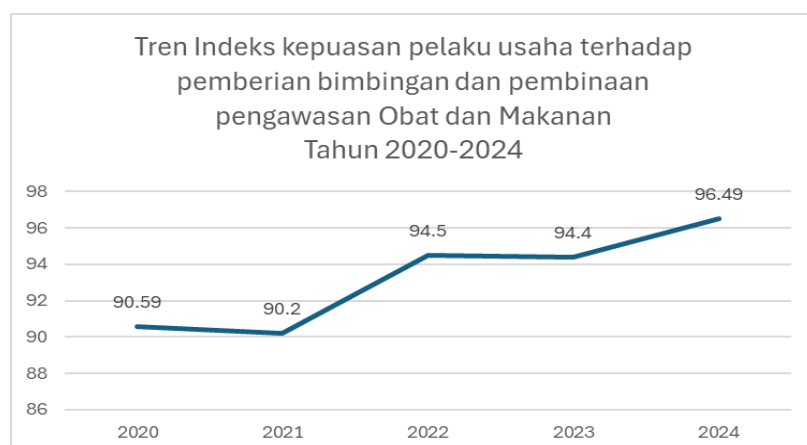


Gambar 1. 8 Tren Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Tahun 2020-2024

- Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK2 yaitu : a) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan Aman melalui program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat maupun dalam program pemberdayaan masyarakat; b) Meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik berupa perluasan cakupan wilayah dan target KIE maupun jenis media KIE; c) Peningkatan sinergi dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor untuk berkolaborasi dan bekerjasama mengedukasi masyarakat dan menyebarkan informasi keamanan Obat dan Makanan; d) Mengembangkan program yang kreatif dan inovatif disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.
3. Sasaran Kegiatan (SK3) yaitu Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan

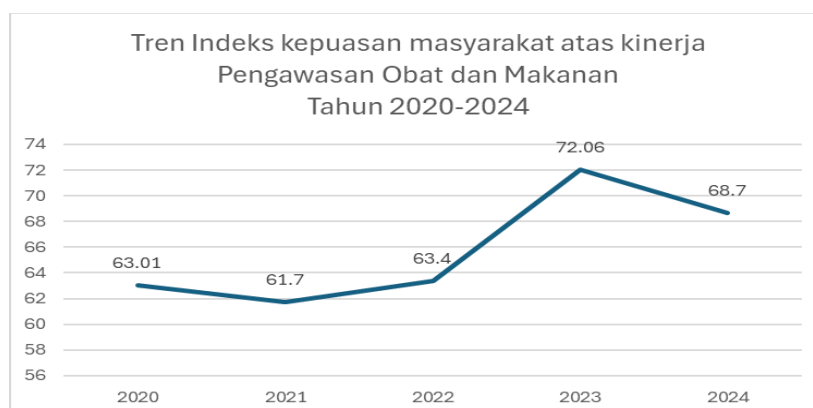
Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM mencakup berbagai hal yang terkait dengan pengawasan rangka fungsi dalam perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- 1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.



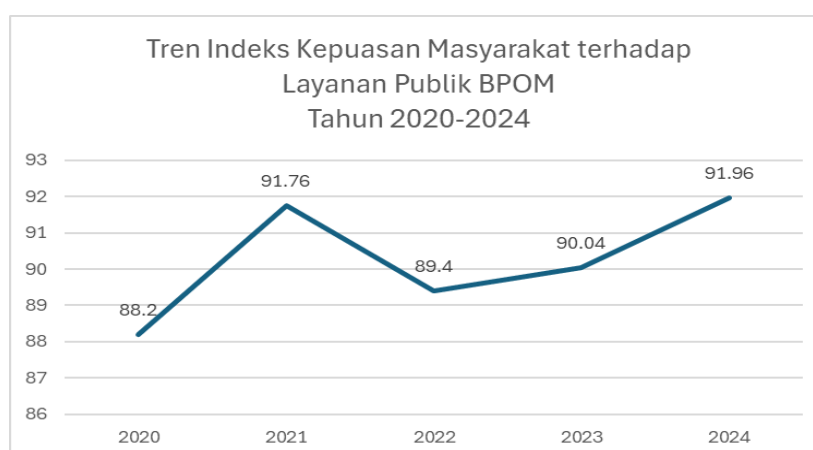
Gambar 1. 9 Tren Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

- 2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan



Gambar 1. 10 Tren Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT



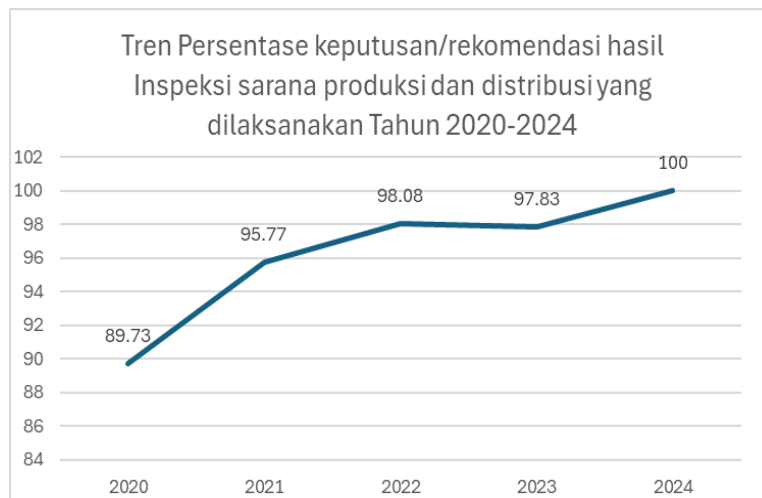
Gambar 1. 11 Tren Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT Tahun 2020-2024

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK3 yaitu : a) Meningkatkan kompetensi petugas terkait materi bimbingan dan pembinaan yang diberikan; b) Pendampingan, bimbingan teknis, desk, dan sosialisasi yang diberikan kepada pelaku usaha dijadwalkan secara rutin; c) *Feedback* yang cepat dan jelas dari petugas terhadap permintaan Informasi pelaku usaha; d) Melakukan publikasi kegiatan pengawasan dan KIE melalui media sosial dan *subsite* secara rutin; e) Membuat konten publikasi/edukasi bersama kader/komunitas yang diintervensi program keamanan pangan; f) Menambah ragam publikasi melalui media lain (videotron, talk show radio/televisi); g) Memberikan Sosialisasi standar layanan secara berkala melalui media sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait layanan publik Balai Besar POM di Jayapura; h) Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik BBPOM di Jayapura.

4. Sasaran Kegiatan (SK4) yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan sistem yang komprehensif agar BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jayapura akan meningkat efektivitasnya apabila Balai Besar POM di Jayapura mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan



Gambar 1. 12 Tren Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2020-2024

- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan



Gambar 1. 13 Tren Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2020-2024

- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.



Gambar 1. 14 Tren Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020-2024

4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan



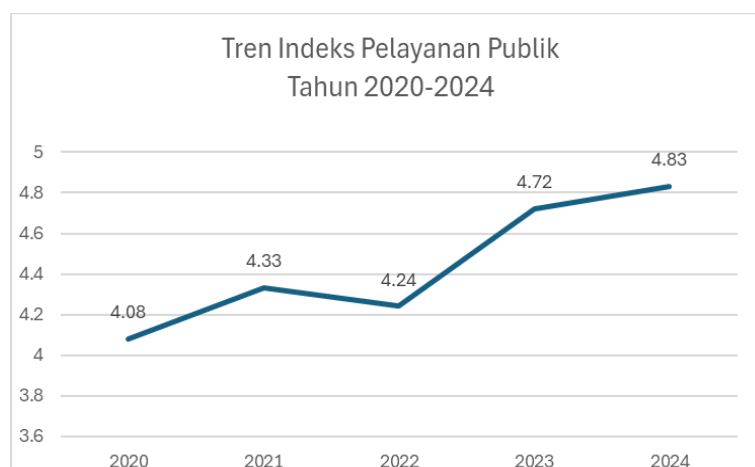
Gambar 1. 15 Tren Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2020-2024

5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan



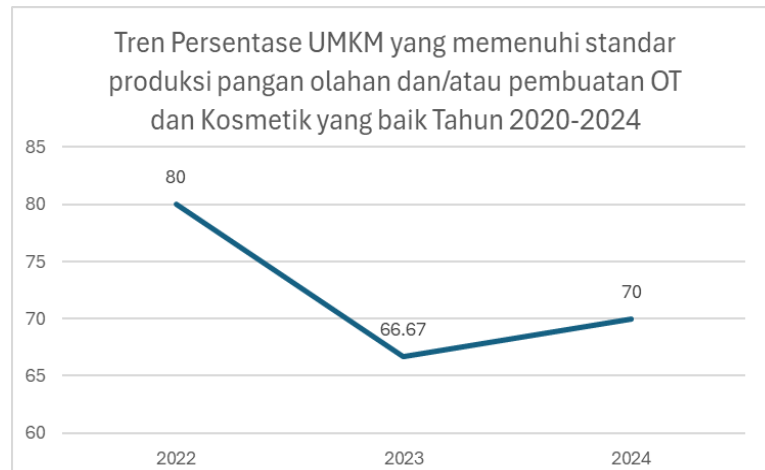
Gambar 1. 16 Tren Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2020-2024

6) Indeks Pelayanan Publik



Gambar 1. 17 Tren Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020-2024

7) Persentase UMKM yang memenuhi standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik



Gambar 1. 18 Tren Persentase UMKM yang memenuhi standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik Tahun 2020-2024

8) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

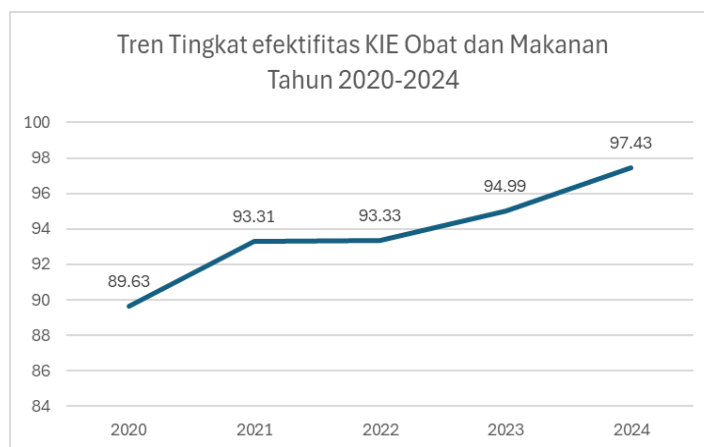
Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK4 yaitu : a) Komunikasi dan koordinasi yang intens dengan Badan POM, UPT lain, dan pemangku kepentingan lainnya; b) monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan yang sudah dilakukan; c) Komunikasi dan koordinasi ke Pemerintah Daerah yang belum optimal dalam memberikan respon, khususnya ke Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sebagai daerah otonomi baru secara berkala; d) komunikasi yang lebih intens dengan Dinas Kesehatan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga (PIRT); e) Melakukan Pendampingan secara intens kepada pelaku usaha selama proses sertifikasi; f) Melakukan bimbingan teknis kepada pimpinan/penanggung jawab sarana yang akan disertifikasi sebelum pengajuan permohonan; g) Peningkatan kompetensi petugas sertifikasi, pembinaan dan pengawasan secara berkala; h) Melakukan perbaikan dan peningkatan pada unit pelayanan publik seperti publikasi berbagai layanan yang dimiliki Balai Besar POM di Jayapura melalui media sosial, fasilitas pelayanan dan meningkatkan kompetensi petugas pelayanan; i) Melakukan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan DAK non Fisik dan

melaksanakan money review terhadap pelaksanaan DAK non Fisik.

5. Sasaran Kegiatan (SK5) yaitu Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

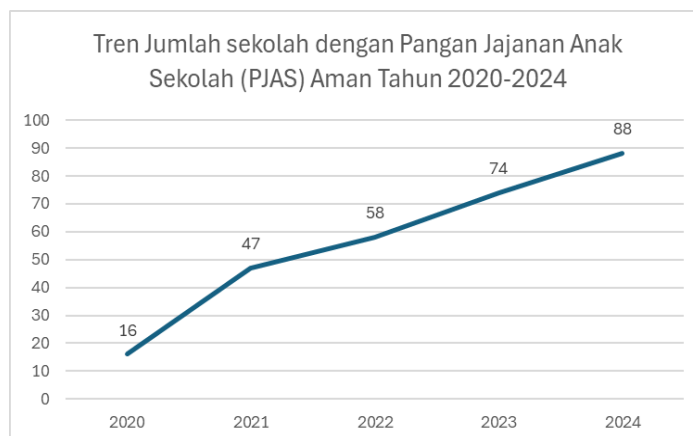
Balai Besar POM di Jayapura sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melakukan berbagai upaya pengawasan obat dan makanan untuk memberikan jaminan keamanan obat dan makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui program Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Keberhasilan program pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM diukur dari dampaknya terhadap masyarakat, salah satunya kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- 1) Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan



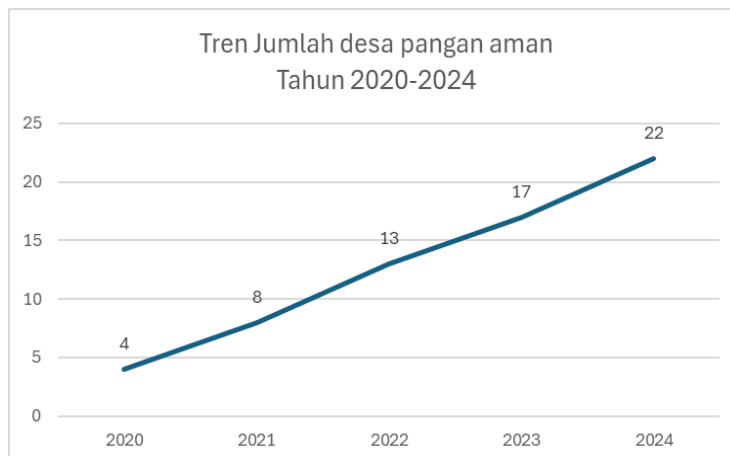
Gambar 1. 19 Tren Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

- 2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman



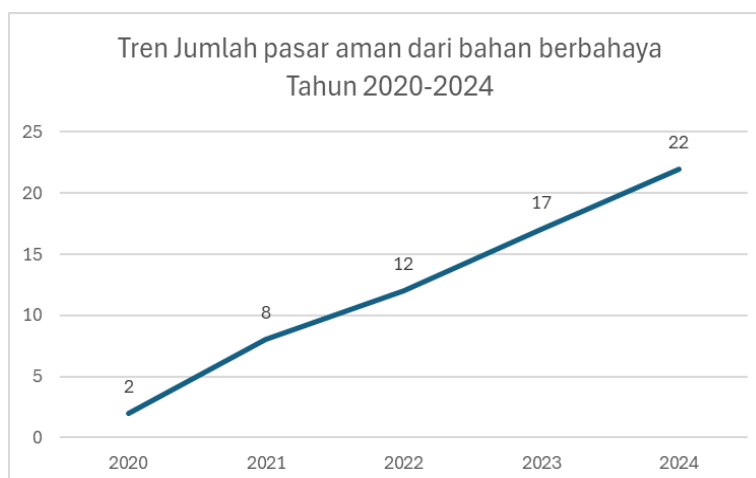
Gambar 1. 20 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman Tahun 2020-2024

3) Jumlah desa pangan aman



Gambar 1. 21 Tren Jumlah desa pangan aman Tahun 2020-2024

4) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas



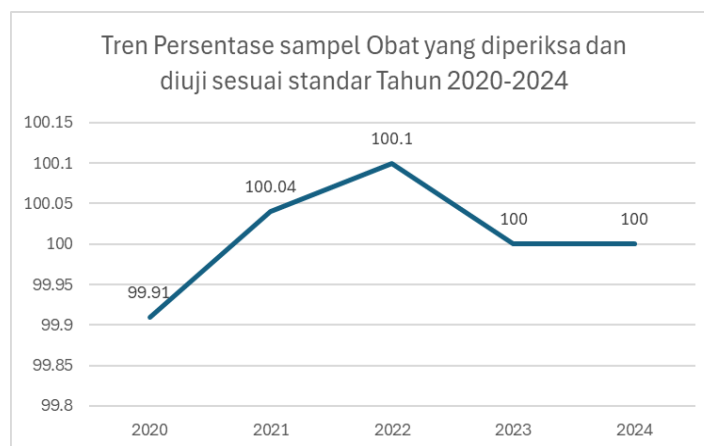
Gambar 1. 22 Tren Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya Tahun 2020-2024

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK5 yaitu : a) pemberian produk informasi keamanan pangan yang menarik dan khas BPOM; b) Peningkatan kompetensi petugas dengan mengikuti antara lain workshop informasi dan komunikasi dan pelatihan teknis KIE; c) Melakukan pelaksanaan KIE melalui program KASBI dengan memberikan materi yang menarik dan mudah dipahami dan dibutuhkan masyarakat; d) Meminta komitmen pemda untuk mendukung keberlanjutan program PJAS aman, Desa pangan aman dan Pasar pangan aman berbasis komunitas; e) Membimbing Tim Keamanan Pangan Sekolah, perangkat desa, dan pengelola pasar dalam menyusun rencana aksi keberlanjutan program; f) meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, tim yang terlibat dalam mendukung program nasional.

6. Sasaran Kegiatan (SK6) yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Pemeriksaan produk Obat dan Makanan dilakukan untuk menjamin keamanan mutu Obat dan Makanan. Obat yang dimaksud adalah obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi. Adapun sampel yang diperoleh yaitu sampel Obat dan Makanan meliputi sampel rutin, kasus dan sampel pihak ketiga. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar dimana standar yang dimaksud yaitu standar pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- 1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar



Gambar 1. 23 Tren Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020-2024

- 2) Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar



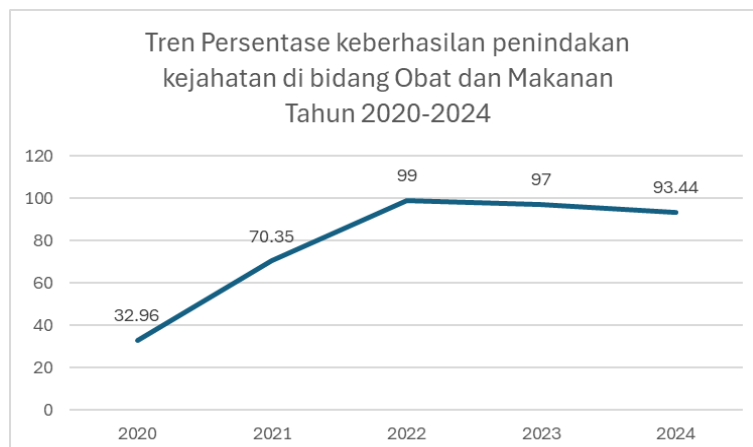
Gambar 1. 24 Tren Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020-2024

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK6 yaitu : a) Koordinasi dengan Pusat terkait perubahan sampling, dimana sebagian sampel tidak ditemukan di sarana pada saat sampling; melakukan koordinasi secara internal terkait kepastian jumlah dan jenis sampel, dan ketersediaan reagen dan media pada laboratorium pengujian serta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan UPT lain di lingkup regional V; b) secepatnya melakukan pengadaan terkait ketersediaan reagen, media, suku cadang serta peralatan laboratorium; c) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam peningkatan efektivitas pemeriksaan dan pengujian sampel; d) Perbaikan dan peningkatan terhadap alat laboratorium yang rusak.

7. Sasaran Kegiatan (SK7) yaitu Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Jayapura melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- 1) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan



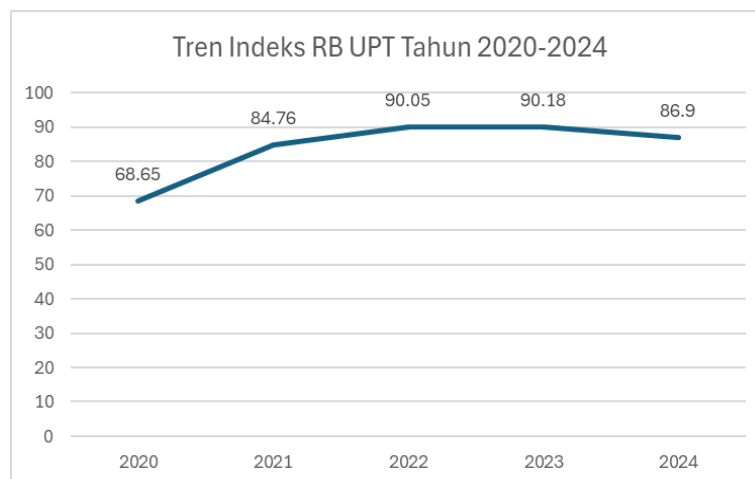
Gambar 1. 25 Tren Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK7 yaitu : a) Perkuatan koordinasi lintas sektor CJS dengan berbagai kegiatan, seperti (i) FGD Perkuatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan (koordinasi lintas sektor); (ii) Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan; (iii) Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS BPOM; b) Peningkatan jejaring informasi dengan mengintensifkan peran informan perlu dioptimalkan sehingga dapat membantu meningkatkan potensi keberhasilan penindakan Obat dan Makanan.

8. Sasaran Kegiatan (SK8) yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal

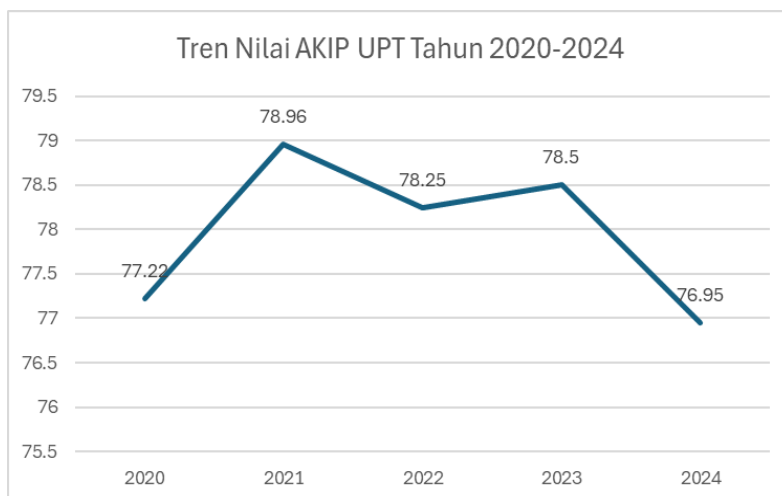
Untuk melaksanakan tugas Balai Besar POM di Jayapura, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Jayapura. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

3) Indeks RB UPT



Gambar 1. 26 Tren Indeks RB UPT Tahun 2020-2024

4) Nilai AKIP UPT

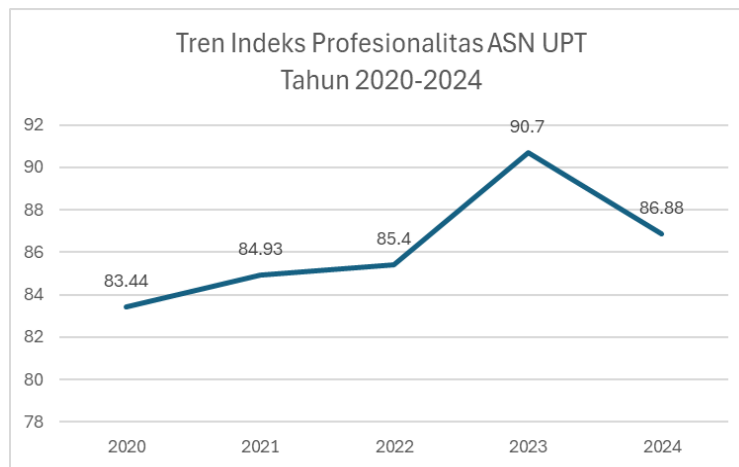


Gambar 1. 27 Tren Nilai AKIP UPT Tahun 2020-2024

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK8 yaitu : a) Melaksanakan kegiatan rencana pembangunan ZI sesuai dengan rencana dan melakukan monev rencana aksi pembangunan ZI secara memadai dengan dilengkapi capaian, kendala/hambatan, dan RATL per area perubahan serta menindaklanjuti hasil monev; b) menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sebagaimana tercantum pada LHE SAKIP dari Inspektorat Utama; c) Terus berupaya mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan; d) Peningkatan kualitas SDM pengelola akuntabilitas.

9. Sasaran Kegiatan (SK9) yaitu Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal
- SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- 1) Indeks Profesionalitas UPT



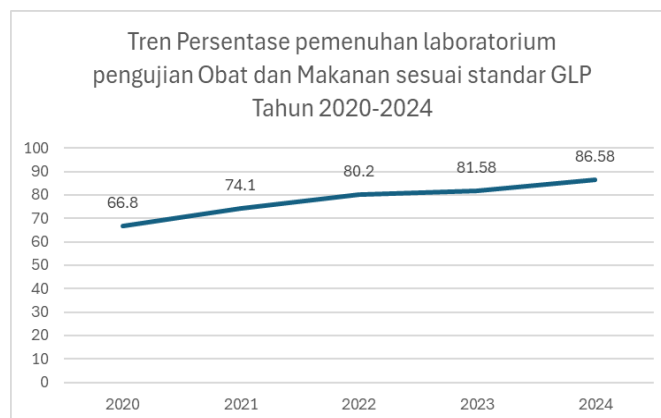
Gambar 1. 28 Tren Indeks Profesionalitas UPT Tahun 2020-2024

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK9 yaitu : a) Melaksanakan pengembangan kompetensi baik pelatihan fungsional, pelatihan teknis, dan *workshop/seminar* yang diikuti oleh pegawai baik secara terjadwal maupun tidak terjadwal (daring maupun luring), mandiri ataupun yang dikelola oleh PPSDM dan Balai Besar POM di Jayapura; b) Melakukan penilaian Sasaran Kinerja Program secara berkala dan tepat waktu; c) Melakukan komunikasi, koordinasi, dan pendampingan oleh Biro SDM Badan POM.

10. Sasaran Kegiatan (SK10) yaitu Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

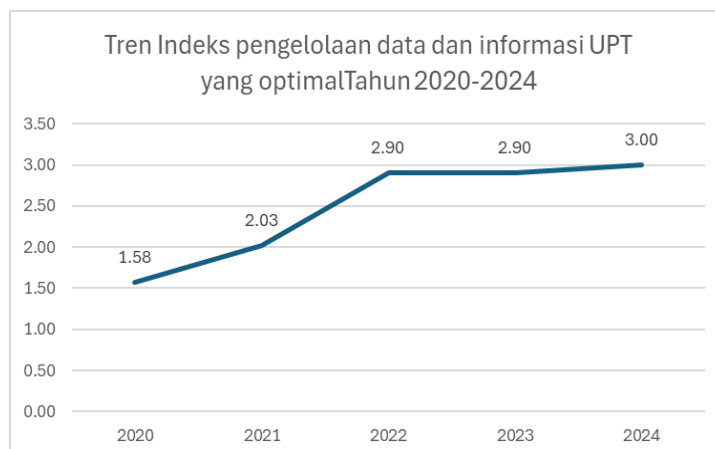
Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1) Persentase pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP



Gambar 1. 29 Tren Persentase pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2020-2024

2) Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal



Gambar 1. 30 Tren Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal Tahun 2020-2024

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK10 yaitu : a) pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), peralatan laboratorium, dan peningkatan kompetensi SDM sesuai rencana; b) monitoring evaluasi SKL secara berkala (triwulan) sehingga jika ada kendala pada pemenuhannya dapat segera ditangani; c) Percepatan pengisian SIPT baik pemeriksaan maupun pengujian, penggunaan email corporate dan upload berita-berita aktual secara konsisten serta pemeliharaan sarana dan prasarana IT; d) Meningkatkan kapasitas Alat Pengolah Data.

11. Sasaran Kegiatan (SK11) yaitu Terkelolanya keuangan UPT secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

3) Nilai Kinerja Anggaran UPT



Gambar 1. 31 Tren Nilai Kinerja Anggaran UPT Tahun 2020-2024

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK11 yaitu : a) meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran; b) Pelaporan kinerja melalui aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat.

I.1.2 Aspirasi *Stakeholder*

Balai Besar POM di Jayapura menjaring *feedback* dan aspirasi masyarakat salah satunya melalui Survei Kesehatan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu serta Forum konsultasi publik Tahun 2024. Survei ini dilakukan langsung kepada responden masyarakat di 20 Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil survei tersebut, telah dilakukan analisis data kualitatif atas *feedback* yang diberikan oleh masyarakat. Berikut di bawah ini adalah klasterisasi saran yang sering muncul dari *feedback* dan saran masukan dari masyarakat.

Tabel 1. 3 Tabel Klasterisasi Saran, Feedback dan Masukan

No	<i>Feedback, Saran dan Masukan</i>	Persentase
1	Pendampingan Pelaku Usaha	8.33 %
2	Pembinaan Pelaku Usaha	4.17 %
3	Pelayanan Publik	45.83 %
4	Pengujian Laboratorium	16.66 %
5	Sosialisasi CPPOB	12.5 %
6	Pelatihan CDOB	4.17 %
7	Kerjasama Lintas Sektor	4.17 %

No	Feedback, Saran dan Masukan	Persentase
8	Pengawasan Obat dan Makanan	4.17 %

Berdasarkan hasil klasterisasi saran diatas dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

1. Balai Besar POM di Jayapura dapat meningkatkan pelayanan publik yang diberikan untuk masyarakat.
2. Balai Besar POM di Jayapura melakukan pendampingan kepada Pelaku Usaha baik melalui pendampingan, pembinaan maupun pelatihan dan sosialisasi.
3. Balai Besar POM di Jayapura dapat mempertahankan kualitas Laboratorium Pengujian agar Pengujian Sampel dari masyarakat selesai tepat waktu.

I.2 Potensi dan Permasalahan

Balai Besar POM di Jayapura memiliki potensi dan permasalahan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. sebagai salah satu UPT BPOM yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Indonesia, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik.

Menyusun strategi pengawasan obat dan makanan yang efektif memang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang potensi dan permasalahan yang dihadapi. Dengan mengenali potensi, Balai Besar POM di Jayapura bisa memanfaatkan keunggulan yang dimiliki untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Di sisi lain, dengan memahami permasalahan, strategi yang dirancang dapat lebih tepat sasaran untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, dilakukan pendekatan dengan analisis SWOT untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh BPOM periode 2025 - 2029.

I.2.1 Kekuatan (*Strength*)

Kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Balai Besar POM di Jayapura, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya,

kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Balai Besar POM di Jayapura keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Balai Besar POM di Jayapura di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Jayapura, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya

1. Komitmen Kepemimpinan yang Kuat

Komitmen pimpinan merupakan faktor kunci dalam membangun dan mengarahkan kinerja organisasi, termasuk di Balai Besar POM di Jayapura. Komitmen ini dapat menjadi kekuatan utama dalam mendorong efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang, terutama dalam memastikan pengawasan obat dan makanan yang aman serta berkualitas di wilayah *catchment* area. Beberapa komitmen pimpinan bisa menjadi kekuatan kinerja Balai Besar POM di Jayapura seperti menetapkan visi dan misi yang jelas dan arah yang tepat sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh anggota organisasi tahu tujuan jangka panjang yang ingin dicapai; mendorong terciptanya perubahan yang berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi masyarakat serta dunia usaha, khususnya yang berhubungan dengan obat dan makanan; meningkatkan pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan. Pimpinan juga memberikan penghargaan atas kinerja yang baik; meningkatkan sistem pengawasan dan audit terhadap peredaran obat dan makanan sehingga Balai Besar POM di Jayapura bisa menjadi lebih proaktif dan efisien dalam mendeteksi dan menanggulangi produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Juga memperkuat hubungan dengan stakeholders seperti Dinas Kesehatan, Polri, BPOM pusat, dan dengan dunia usaha untuk memperlancar alur koordinasi dalam menangani masalah yang berkaitan dengan obat dan makanan. Sinergi antara berbagai pihak akan memperkuat Balai Besar POM di Jayapura dalam menjaga kualitas produk yang beredar di pasar ; Penggunaan teknologi dan sistem informasi dengan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Balai Besar POM di Jayapura sehingga mempermudah proses manajemen, pengawasan obat dan makanan, dan yang dapat mempercepat penanganan kasus atau keluhan masyarakat; dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman, serta menghindari produk yang tidak terdaftar atau berpotensi

berbahaya. Program-program edukasi, seperti penyuluhan dan kampanye tentang bahaya obat dan makanan, akan semakin memperkuat posisi Balai Besar POM di Jayapura sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat. Komitmen pimpinan adalah kekuatan utama dalam mendorong kinerja Balai Besar POM di Jayapura. Melalui kebijakan yang jelas, peningkatan kapasitas SDM, pengawasan yang efektif, kerjasama yang erat dengan berbagai pihak, serta komunikasi yang terbuka, pimpinan dapat memperkuat peran Balai Besar POM di Jayapura dalam menjaga kualitas dan keamanan obat dan makanan di wilayah tersebut. Selain itu, komitmen pimpinan untuk berfokus pada pemberdayaan masyarakat akan memperkuat kesadaran publik mengenai pentingnya pengawasan obat dan makanan.

Beberapa penghargaan yang diperoleh Balai Besar POM di Jayapura sebagai bukti nyata komitmen untuk terus berkembang adalah sebagai berikut :

- 1) Penghargaan The Best HR Manager Terbaik II tahun 2024
 - 2) Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM Kategori PPID Balai Besar POM, tahun 2024 Predikat Informatif
 - 3) Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2024, dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima
 - 4) Apresiasi atas Inovasi Aplikasi Noken bahwa Inovasi di replikasi di tingkat Nasional tahun 2024
 - 5) Penghargaan Juara Pertama Cashless Award 2023 Kategori Penggunaan KKP dengan nilai transaksi terbanyak dari Kanwil DJPb Provinsi Papua
 - 6) Penghargaan Terbaik 1 Kategori Satker dengan Nominal Transaksi KKP terbesar Periode Semester II tahun 2023 dari KPPN Jayapura
 - 7) Penghargaan Terbaik 2 Kategori Satker dengan Jumlah Transaksi Digipay terbesar Periode Semester II tahun 2023 dari KPPN Jayapura
 - 8) Sertifikat Terbaik 1 Penyidik BBPOM di Jayapura dari Karo Korwas PPNS Badan Reserse Kriminal Polri tahun 2024
 - 9) Penghargaan Duta Satker KPPN Jayapura tahun 2023
 - 10) Sertifikat Penghargaan Uji Profisiensi PME PCR COVID-19 siklus 2 tahun 2021, sebagai Lab Uji Covid selama Masa Pandemi tahun 2019 - 2020
2. Tersedianya regulasi yang mendukung tupoksi
- Regulasi menjadi kekuatan utama bagi BPOM dalam melaksanakan tugas pokok dan

funksinya (tupoksi) karena memberikan dasar hukum, panduan teknis, dan kerangka kerja yang diperlukan untuk menjalankan pengawasan secara efektif. Regulasi memberikan legitimasi bagi BPOM untuk bertindak sesuai kewenangannya. Dengan dasar hukum yang kuat, BPOM dapat membuat peraturan turunan dari undang-undang yang relevan, seperti UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menjalankan pengawasan dengan payung hukum yang melindungi tindakan BPOM, seperti inspeksi, pengujian produk, atau penegakan sanksi. Regulasi memperkuat kemampuan Balai Besar POM di Jayapura dalam melaksanakan pengawasan pra dan pasca-pasar, antara lain : melakukan inspeksi fasilitas sarana produksi guna memastikan proses produksi sesuai standar, penarikan produk jika ditemukan produk yang tidak memenuhi syarat, penegakan hukum. Regulasi mendukung Balai Besar POM di Jayapura dalam memberikan perlindungan kepada konsumen melalui kewajiban pelabelan yang informatif, seperti daftar komposisi, tanggal kadaluarsa, dan informasi lainnya . Selain itu, Program edukasi yang didukung peraturan, seperti kampanye "Cek KLIK" (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kadaluarsa).

Regulasi menjadi kekuatan Balai Besar POM di Jayapura dengan memberikan landasan hukum, pedoman operasional, dan mekanisme pengawasan yang terstruktur. Tanpa regulasi, Balai Besar POM di Jayapura tidak dapat melaksanakan tupoksinya secara efektif, baik dalam memastikan keamanan produk, menjaga mutu, maupun melindungi masyarakat dari risiko kesehatan. Regulasi yang jelas dan adaptif juga membantu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM di Jayapura.

3. Kelembagaan yang Mandiri, Kuat dan Transparan

Balai Besar POM di Jayapura memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan kualitas, keamanan, dan efektivitas obat dan makanan yang beredar di pasaran. Sebagai salah satu UPT BPOM yang memiliki tugas pengawasan, Balai Besar POM di Jayapura memiliki potensi untuk menjadi suatu kekuatan dalam melindungi kesehatan masyarakat, meningkatkan daya saing industri, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa point kelembagaan BPOM bisa menjadi kekuatan:

Peran Regulasi dan Pengawasan yang Kuat, Pencegahan dan Pengendalian Risiko Kesehatan, Pendidikan dan Sosialisasi kepada Masyarakat, Pengembangan dan

Peningkatan Standar Industri, Kemandirian dan Transparansi Lembaga, Peningkatan Sistem Teknologi dan Inovasi, Sanksi yang Tegas terhadap Pelanggaran; Mendukung Inovasi dan Pengembangan Produk Lokal.

Kelembagaan Balai Besar POM di Jayapura menjadi suatu kekuatan yang signifikan dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah Papua sebagai salah satu UPT BPOM yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanan, mutu, dan manfaat obat serta makanan, Balai Besar POM di Jayapura memiliki potensi besar untuk memperkuat pengawasan di wilayah tersebut, yang seringkali menghadapi tantangan geografis, sosial, dan ekonomi. Dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas, dukungan teknologi, serta kolaborasi yang kuat dengan stakeholders, Balai Besar POM di Jayapura tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan, mempercepat penindakan terhadap pelanggaran, dan secara keseluruhan menjaga kesehatan masyarakat di Papua.

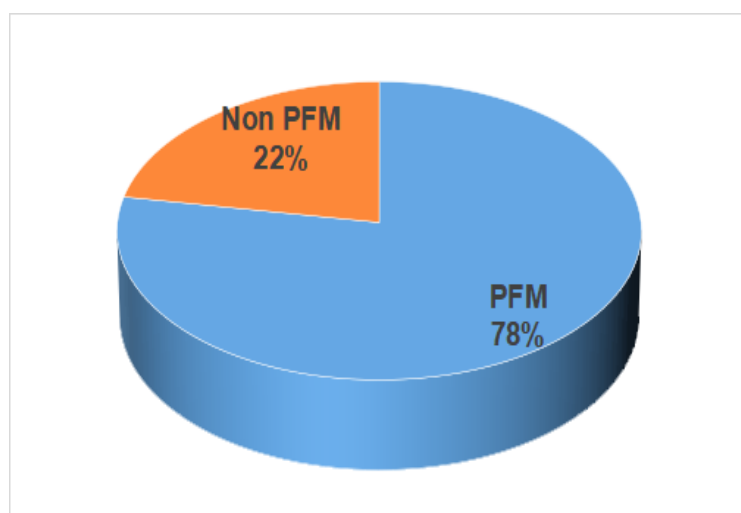
4. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang andal

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor kunci keberhasilan Balai Besar POM di Jayapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). SDM yang kompeten, profesional, berintegritas dan berdedikasi menjadi kekuatan utama bagi Balai Besar POM di Jayapura dalam menjalankan pengawasan terhadap obat dan makanan.

Balai Besar POM di Jayapura didukung oleh Sumber daya Manusia (SDM) yang sampai dengan tahun 2024 berjumlah 66 orang ASN (PNS 63 orang, PPPK 3 orang) dan 5 orang PPNP. Sebanyak 63 pegawai merupakan Pejabat Fungsional PFM dan non PFM yang telah memiliki kompetensi teknis dan keahlian spesifik tertentu dalam bidang keilmuan atau keterampilan teknis. 78% dari pegawai merupakan Pejabat Fungsional PFM dengan spesialisasi pada fungsi infokom sebanyak 6 pegawai, spesialisasi pada fungsi pemeriksaan sebanyak 14 pegawai, spesialisasi pada fungsi penindakan sebanyak 3 pegawai, spesialisasi pada fungsi pengujian sebanyak 26 pegawai. Selain itu Balai Besar POM di Jayapura juga didukung oleh Pejabat Struktural 2 pegawai, Pejabat fungsional tertentu sebanyak 14 pegawai dan Pelaksana sebanyak 1 pegawai.

Tabel 1. 4 Jumlah pegawai Balai Besar POM di Jayapura Per jabatan Fungsional.

No	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	3
2	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	24
3	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	14
4	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	5
5	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	3
6	Analisis Anggaran Ahli Muda	1
7	Analisis Anggaran Ahli Pertama	1
8	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	2
9	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1
10	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
11	Pranata Keuangan APBN Terampil	2
12	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1
13	Perencana Ahli Pertama	1
14	Pranata Komputer Ahli Pertama	1
15	Arsiparis Ahli Pertama	1
16	Penata Laksana Barang Mahir	1
17	Penata Laksana Barang Terampil	1



Gambar 1.32 Data distribusi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM)

Balai Besar POM di Jayapura mempunyai strategi manajemen SDM yang komprehensif untuk menutup gap ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan.

Pelaksanaan strategi manajemen SDM yang komprehensif untuk menutup gap

ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan semua jenis jenjang jabatan. Balai Besar POM di Jayapura mengoptimalkan SDM dengan memberdayakan setiap pegawai sesuai dengan keahlian terbaik mereka, Kolaborasi Tim yang Kuat, pelatihan dan pengembangan kompetensi atau mentoring internal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pegawai, ketersediaan dan penggunaan alat dan teknologi yang dapat membantu tugas-tugas rutin dan mengurangi pekerjaan secara manual sehingga efektif dan efisien, serta fokus prioritas utama yang memberikan dampak besar. Terdapat kebijakan pola karir, mutasi dan promosi pegawai yang harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten yang bertujuan untuk mengoptimalkan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi agar berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan dilakukan untuk menjamin Peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Peningkatan pengembangan kompetensi SDM terus dilakukan, dalam bentuk keikutsertaan pelatihan fungsional, pelatihan teknis, bimtek, dan workshop yang dilaksanakan secara luring maupun daring. Balai Besar POM di Jayapura memberikan kesempatan kepada Pegawai untuk peningkatan kualifikasi pendidikan melalui program Tugas Belajar baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

5. Sistem Pelayanan Publik yang memadai

Pelayanan publik yang berkualitas mencerminkan kekuatan utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura. Ditunjang oleh keberadaan petugas layanan yang kompeten dan berdedikasi tinggi serta memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan masyarakat menjadi pendukung utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif dan efisien. Selain itu, sistem digitalisasi layanan (SIPT Pihak Ketiga, e-registrasi, beberapa bit.ly layanan seperti Sarang Semut dan Sagu Emas Papua) juga menjadi nilai tambah yang mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan dengan mudah.

Selain kompetensi SDM dan penggunaan teknologi, Unit Layanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui program pelatihan staf dan evaluasi layanan melalui berbagai tools antara

lain Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan *Self Assessment* Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan. Disamping itu penyusunan Standar Pelayanan berbasis partisipasi masyarakat melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) memastikan bahwa kebijakan dan program pelayanan publik benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat/pengguna layanan.

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Implementasi Inovasi Teknologi Informasi (TI) dapat menjadi kekuatan utama Balai Besar POM di Jayapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Dengan pemanfaatan TI yang efektif, Balai Besar POM di Jayapura dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan jangkauan pengawasan terhadap obat, makanan, dan produk terkait lainnya. Teknologi informasi memungkinkan Balai Besar POM di Jayapura menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan produk, seperti E-Registration: Sistem online yang memudahkan pelaku usaha mengajukan izin edar tanpa harus datang langsung ke kantor Balai Besar POM di Jayapura; Digitalisasi dokumen: Memastikan data perizinan tersimpan dengan aman dan mudah diakses; Pemantauan real-time: Pelaku usaha dapat melacak status pengajuan izin mereka secara online. Dengan sistem ini, Balai Besar POM di Jayapura mampu memberikan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Memantau mutu produk dengan metode analisis berbasis perangkat lunak. Teknologi informasi terintegrasi dengan alat laboratorium yang memungkinkan untuk mengontrol kinerja alat dalam melakukan pengujian dan mengelola data hasil pengujian secara otomatis dan akurat. Perangkat lunak (*software*) yang digunakan adalah *AnyDesk* yang terpasang pada alat pengolah data (komputer) *Gas Chromatography - Mass Spectroscopy* (GC-MS) yang memungkinkan untuk mengontrol kinerja alat dimanapun dengan menggunakan komputer atau handphone yang telah terinstal aplikasi *AnyDesk* dan sinkron dengan alat GC-MS. Berbagi hasil pengujian secara cepat melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) antara laboratorium pusat dan daerah melalui jaringan TI. Hal ini meningkatkan kemampuan Balai Besar POM di Jayapura dalam memastikan keamanan dan mutu produk. Teknologi Informasi memperkuat Balai Besar POM di Jayapura dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui Website resmi yaitu jayapura.pom.go.id sebagai sumber informasi tentang regulasi, daftar produk terdaftar, dan temuan kasus pelanggaran.

Aplikasi mobile *bpom mobile* untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi, seperti memeriksa legalitas produk atau melaporkan produk ilegal. Media sosial facebook dengan nama akun *Balai Besar POM di Jayapura*, instagram *@bpom.jayapura*, tiktok *@bpom.jayapura*, youtube *Balai Besar POM di Jayapura* sebagai platform untuk menyebarkan edukasi tentang keamanan obat dan makanan secara luas dan cepat.

Teknologi informasi adalah kekuatan strategis BPOM yang memperkuat pengawasan, meningkatkan efisiensi, dan memperluas jangkauan layanan. Dengan pemanfaatan TI yang optimal, BPOM dapat lebih efektif dalam melindungi masyarakat dari risiko kesehatan yang terkait dengan obat, makanan, dan produk lainnya. Investasi berkelanjutan dalam TI akan memastikan BPOM tetap relevan di tengah perkembangan teknologi dan tantangan global.

7. Dukungan Sarana dan Prasarana yang Memadai

Sarana dan prasarana di Balai Besar POM di Jayapura menjadi suatu kekuatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya Infrastruktur yang baik, seperti laboratorium yang lengkap, kendaraan operasional, dan sistem informasi yang terintegrasi, memungkinkan petugas untuk melakukan inspeksi dan pengujian produk dengan lebih cepat dan tepat. Hal ini menjadi kekuatan dalam memastikan bahwa produk yang beredar di Papua memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Penguatan Laboratorium dan implementasi sistem manajemen mutu laboratorium ISO/IEC 17025 :2017 dan dengan pemenuhan sarana laboratorium yang canggih dan fasilitas pengujian yang memadai, Balai Besar POM di Jayapura dapat melakukan pengujian obat dan makanan Laboratorium yang lengkap memungkinkan identifikasi bahan berbahaya, kandungan yang tidak sesuai, atau produk yang mengandung mikroorganisme patogen, yang sangat penting untuk mencegah potensi risiko kesehatan.

Sarana dan prasarana di Balai Besar POM di Jayapura juga berperan dalam memfasilitasi kerja sama dengan berbagai pihak lokal seperti pemerintah daerah, institusi pendidikan, pelaku industri, serta masyarakat. Fasilitas laboratorium pengujian, ruang rapat, ruang diskusi, atau pusat informasi bisa dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi dalam menciptakan ekosistem yang lebih baik bagi pengawasan obat dan makanan di Papua.

Sarana dan prasarana yang memadai di Balai Besar POM di Jayapura menjadi

kekuatan dalam meningkatkan pengawasan, melindungi kesehatan masyarakat, dan mendukung pembangunan ekonomi di wilayah Papua. Dengan fasilitas yang tepat, seperti laboratorium modern, sistem komunikasi yang efisien, Balai Besar POM di Jayapura dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, merata, dan cepat. Semua ini mendukung upaya menjaga kualitas dan keamanan obat dan makanan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.

8. Sistem Pengawasan yang komprehensif dan kolaboratif dengan stakeholder.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan yang terkait dengan obat dan makanan. Balai Besar POM di Jayapura sebagai salah satu UPT BPOM melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan di wilayah Papua, melakukan pengawasan sebelum dan selama produk obat dan makanan beredar untuk memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat dan makanan. Balai Besar POM di Jayapura juga melakukan pendampingan dan bimbingan kepada pelaku usaha untuk memastikan produk obat dan makanan yang diproduksi atau dihasilkan aman, berkhasiat dan bermutu hingga di tangan konsumen.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Balai Besar POM di Jayapura memberikan informasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar memilih dan mengkonsumsi obat dan makanan yang aman. Balai Besar POM di Jayapura juga berkolaborasi dengan lembaga, kementerian, pemerintah daerah, akademisi dan masyarakat, untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan di wilayah Papua.

I.2.2 Kelemahan (*Weakness*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terus meningkat, Balai Besar POM di Jayapura tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi Balai Besar POM di Jayapura dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja Balai Besar POM di Jayapura dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Jayapura, yang merupakan area

yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. Keterbatasan dan Mutasi SDM

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dihadapi Balai Besar POM di Jayapura berdampak langsung pada kemampuan lembaga ini untuk menjalankan pengawasan obat dan makanan yang efektif dan menyeluruh. Kelemahan ini meningkatkan risiko terjadinya penundaan dalam inspeksi dan pengawasan produk, memungkinkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas beredar lebih lama di pasaran.

Jumlah SDM Balai Besar POM di Jayapura saat ini masih kurang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal mengingat catchment area terdiri dari 17 Kabupaten/Kota. Berdasarkan perhitungan kebutuhan ASN di lingkungan Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2025-2029, Data SIASN Per 30 Juni 2025 kebutuhan SDM sebanyak 104 orang dengan jumlah pegawai eksisting saat ini 74 (tujuh puluh empat) orang. Persentase pemenuhan SDM BPOM sampai dengan saat ini 71,15%, masih terdapat kekurangan SDM sebanyak 30 orang.

Keterbatasan dalam jumlah dan keahlian SDM membatasi kapasitas Balai Besar POM di Jayapura untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Hal ini juga menghambat kemampuan Balai Besar POM di Jayapura dalam mengadopsi dan menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi terbaru dalam pengawasan obat dan makanan, mengurangi efisiensi dan efektivitas operasional. Dampak kelemahan ini tidak hanya terbatas pada operasional internal BPOM, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat, menunjukkan urgensi dalam mengatasi tantangan jumlah SDM untuk menjaga standar pengawasan yang tinggi dan memenuhi ekspektasi publik.

Tingkat permohonan mutasi kembali ke *homebase* yang tinggi dapat mengganggu kelancaran operasional organisasi. dan mempengaruhi produktivitas, dalam tim kerja Mutasi atau pergerakan pegawai masalah serius terkait dengan kontinuitas dan kualitas pekerjaan. Ketika pegawai dengan pengetahuan dan pengalaman spesifik dipindahkan ke UPT lain tanpa pengganti yang memadai, terjadi kekosongan dalam pengetahuan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Kondisi ini dapat

menyebabkan penurunan kinerja dalam unit kerja yang ditinggalkan dan memerlukan waktu penyesuaian bagi pengganti untuk mencapai tingkat keahlian yang sama. Dampak dari mutasi pegawai ini menciptakan risiko lain berupa hilangnya pengetahuan institusional dan gangguan dalam mentransfer informasi penting antara pegawai. Tanpa transisi yang memadai dan dokumentasi prosedur yang efektif, pengalaman dan pengetahuan spesifik yang telah dibangun oleh pegawai lama dapat hilang, menimbulkan kelemahan dalam struktur pengawasan Balai Besar POM di Jayapura. Kelemahan ini bukan hanya berpengaruh pada pekerjaan harian, tetapi juga pada kemampuan Balai Besar POM di Jayapura untuk merespons dengan cepat dan tepat terhadap situasi yang berkembang, yang sangat penting dalam lingkungan pengawasan obat dan makanan yang dinamis dan seringkali kritis.

2. Regulasi dan standar belum memadai

Regulasi, Norma Standar Prosedur (NSP), dan Kriteria yang menjadi panduan Balai Besar POM di Jayapura dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan dapat menjadi kelemahan jika tidak dikelola atau diterapkan dengan tepat. Regulasi, NSP dan kriteria yang tidak sesuai dengan perkembangan pasar dan teknologi, termasuk perubahan dalam pola konsumsi produk obat dan makanan, memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti mengedarkan produk ilegal atau berbahaya. Hal ini mengakibatkan pengawasan obat dan makanan oleh Balai Besar POM di Jayapura tidak optimal. Regulasi dan prosedur yang tumpang tindih dengan kebijakan dari lembaga atau instansi lain, menghambat pelaksanaan pengawasan oleh Balai Besar POM di Jayapura. Hal ini menimbulkan keraguan dalam mengambil keputusan dan menghambat efektivitas pengawasan obat dan makanan yang beredar.

Secara keseluruhan, meskipun Balai Besar POM di Jayapura memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di wilayah Papua, kelemahan terkait dengan regulasi dan standar yang diterapkan menjadi tantangan yang signifikan dalam pelaksanaannya. Keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan ketidaksesuaian antara regulasi dan kondisi lokal menunjukkan perlunya adanya pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif. Oleh karena itu, penyusunan regulasi yang lebih responsif terhadap kondisi spesifik di daerah

seperti Papua sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.

3. Pelaksanaan tugas fungsi Pusat dan Balai yang belum optimal

Balai Besar POM di Jayapura merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sinergi antara Balai Besar POM di Jayapura dan BPOM sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura. Namun hal ini belum berjalan secara optimal antara lain koordinasi yang kurang efektif dimana kurangnya koordinasi antara Balai Besar POM di Jayapura dan BPOM dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas. Kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pusat sering kali tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan lokal yang ada di Papua. Selain itu, kendala geografis dimana lokasi geografis Papua yang cukup terpencil dan sulit dijangkau juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas pengawasan sehingga diperlukan strategi pengawasan yang lebih efektif dan inovatif. Komunikasi yang tidak lancar dan koordinasi yang lemah antara pusat dan daerah menyebabkan keputusan yang dibuat di tingkat pusat tidak selalu relevan atau implementatif di tingkat daerah. Hal ini memperburuk pengawasan produk obat dan makanan, karena Balai Besar POM di Jayapura sering kali harus menyesuaikan kebijakan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Ketergantungan pada Instruksi Pusat sehingga Balai Besar POM di Jayapura sering kali tergantung pada instruksi dan arahan dari pusat untuk menentukan langkah-langkah pengawasan dan penindakan. Ketergantungan ini menghambat fleksibilitas dan inisiatif di tingkat daerah dalam merespons permasalahan yang berkembang dengan cepat. Di daerah seperti Papua, dengan karakteristik geografis dan demografis yang khas maka pengambilan keputusan yang lebih cepat dan responsif sangat dibutuhkan. Ketika pengawasan harus menunggu arahan dari pusat, hal ini sering kali menyebabkan keterlambatan dalam penanganan masalah yang ada di lapangan. Kesulitan dalam Implementasi Kebijakan Pusat Setiap kebijakan yang diterbitkan oleh pusat tidak selalu dapat dengan mudah diterapkan di daerah. Misalnya, standar dan prosedur yang telah disusun di tingkat pusat mungkin tidak selalu sesuai dengan kondisi logistik dan sumber daya yang tersedia di

Jayapura. Dalam beberapa kasus, prosedur yang terlalu kaku atau tidak disesuaikan dengan kondisi lokal menyebabkan kesulitan dalam implementasi, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas pengawasan dan pengendalian produk obat dan makanan yang beredar di wilayah tersebut.

Kurangnya pemahaman atas kondisi lokal. Kurangnya pemahaman dan sensitivitas terhadap kondisi lokal di Papua sering kali menjadi hambatan dalam menciptakan sinergi yang efektif. Pusat yang berlokasi di Jakarta, sering kali tidak sepenuhnya memahami tantangan yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Jayapura terkait dengan geografis, sosial, dan ekonomi. Misalnya, ketergantungan pada sistem distribusi yang terpusat dan kurangnya akses ke daerah-daerah terpencil membuat pengawasan lebih sulit dilakukan. Seharusnya, sinergisme antara pusat dan daerah dapat dibangun dengan lebih memperhatikan dinamika lokal, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar efektif di tingkat lapangan. Secara keseluruhan, kurangnya sinergisme yang efektif antara pusat dan Balai Besar POM di Jayapura telah menciptakan berbagai kelemahan dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Ketergantungan yang tinggi pada arahan pusat, koordinasi yang kurang, dan ketidakcocokan antara kebijakan pusat dan kondisi lokal di Papua menjadi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan sinergi yang lebih baik antara BPOM pusat dan daerah, dengan menyesuaikan kebijakan, mempercepat aliran informasi, serta menyediakan dukungan sumber daya yang lebih memadai bagi Balai Besar POM di Jayapura. Dengan demikian, pengawasan terhadap obat dan makanan di Papua dapat menjadi lebih efektif, responsif, dan tepat sasaran.

4. Ruang lingkup pengujian yang masih terbatas

Keterbatasan ruang lingkup dan parameter pengujian menjadi kelemahan karena Balai Besar POM di Jayapura tidak mampu menguji semua parameter yang dibutuhkan untuk memastikan keamanan dan mutu suatu produk. Pengujian yang dilakukan tidak lengkap, jika diperlukan parameter yang lengkap harus melakukan pengujian ke Balai lain atau ke pusat yang akan memakan waktu dan biaya tambahan. Hal lain yang mungkin timbul karena keterbatasan ruang lingkup dan parameter pengujian adalah terkait perkembangan produk obat dan makanan yang semakin kompleks memerlukan

metode pengujian yang lebih canggih, sehingga Balai Besar POM di Jayapura tidak dapat segera menanggapi munculnya risiko baru seperti bahan kimia berbahaya atau kontaminasi yang tidak terdeteksi.

Dengan semakin berkembangnya metode pengujian, Balai Besar POM di Jayapura memerlukan dukungan peralatan canggih dan teknologi tinggi. Balai dengan fasilitas yang terbatas tidak mampu melakukan pengujian dengan metode terbaru atau pengujian kompleks, sehingga hasil pengujian akan tidak lengkap yang akan menghambat efektivitas pengawasan.

Ruang lingkup yang terbatas sering kali tidak sesuai dengan standar internasional, yang mengharuskan pengujian lebih lengkap dan terperinci. Ini dapat mengurangi kredibilitas hasil pengujian, terutama jika produk diekspor atau diaudit oleh lembaga internasional. Produk yang beredar di pasar, termasuk produk impor, juga memerlukan pengujian dengan parameter uji yang lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika Balai Besar POM di Jayapura tidak memiliki kemampuan tersebut, produk berisiko lolos tanpa pemeriksaan yang memadai. Keterbatasan pengujian dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan balai dalam menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di Provinsi Papua.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan ini adalah:

- 1) Pengembangan fasilitas dan teknologi
Menyusun perencanaan anggaran untuk pengadaan alat canggih dan modern sesuai dengan kebutuhan pengujian.
- 2) Peningkatan kompetensi SDM
Melakukan pelatihan bagi staf untuk menguasai metode pengujian baru dan penggunaan alat berteknologi tinggi.
- 3) Perluasan ruang lingkup pengujian
Menambahkan parameter pengujian untuk mencakup risiko baru yang muncul di bidang obat dan makanan.
- 4) Kerja sama dengan Balai dan Pusat
Membangun kerjasama dengan Balai dan Pusat untuk pelaksanaan pengujian dan pemenuhan kebutuhan pengujian.
- 5) Berkoordinasi dengan pusat terkait pengembangan metode pengujian

Memberikan masukan terkait metode yang perlu diadakan atau dikembangkan.

5. TIK dan sarpras pendukung yang belum optimal

Kekurangan atau kelemahan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal dapat menjadi hambatan signifikan bagi organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kurangnya infrastruktur teknologi keterbatasan perangkat keras seperti komputer/laptop, server, atau jaringan yang usang atau tidak memadai menghambat proses kerja jaringan internet tidak stabil. Koneksi internet yang lambat atau tidak tersedia di beberapa tempat/ruangan mengganggu komunikasi dan akses data. Sistem Informasi yang tidak terintegrasi, dimana data yang tersebar di berbagai sistem tanpa integrasi menyebabkan duplikasi atau inkonsistensi informasi. Sulitnya berbagi data antar unit atau antara pusat dan daerah memperlambat pengambilan keputusan.

Minimnya SDM yang kompeten di Bidang TIK, kurangnya tenaga ahli yang mampu mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan sistem teknologi informasi. Minimnya pelatihan dan pengembangan keterampilan SDM dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Keamanan data yang lemah, dimana sistem keamanan yang belum memadai meningkatkan risiko kebocoran data atau serangan siber. Tidak adanya protokol atau standar keamanan yang jelas, seperti enkripsi data atau cadangan data.

Terbatasnya anggaran pengembangan TIK menyebabkan kesulitan dalam pengadaan perangkat baru, pembaruan sistem, atau pelatihan SDM. Kurangnya prioritas untuk alokasi dana bagi TIK dan sarana prasarana. Dampak kelemahan ini efisiensi pengawasan obat dan makanan kerja menurun, bisnis proses kerja menjadi lambat dan tidak produktif, gangguan komunikasi, hambatan dalam koordinasi antar unit atau dengan pihak eksternal/stakeholders. Layanan kepada masyarakat atau pengguna menjadi tidak maksimal. Kehilangan daya saing: Organisasi tertinggal dalam adopsi teknologi dibandingkan kompetitor.

Solusi untuk mengatasi kelemahan diantaranya penguatan Infrastruktur TIK dengan meng-*upgrade* perangkat keras dan jaringan internet. Memasang sistem informasi terintegrasi untuk mempermudah akses dan pengelolaan data. Peningkatan kompetensi SDM untuk meningkatkan pemahaman dan

penggunaan TIK. Merekrut SDM di bidang teknologi untuk mengelola sistem. Digitalisasi. Mengalihdayakan proses manual menjadi sistem digital untuk meningkatkan efisiensi, menerapkan teknologi seperti cloud storage untuk efisiensi data. Keamanan Data yang Lebih Kuat Menggunakan sistem keamanan canggih seperti firewall, antivirus, dan backup data secara berkala. Menerapkan protokol keamanan data dan pelatihan terkait kesadaran keamanan siber. Pengadaan Sarana Prasarana Modern Memastikan fasilitas pendukung seperti peralatan kerja, ruang kantor, dan alat komunikasi dalam kondisi baik. Menyediakan anggaran untuk perawatan dan penggantian fasilitas secara berkala. Dengan upaya ini, organisasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan melalui TIK dan sarana prasarana yang optimal.

6. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor

Salah satu kelemahan utama dalam membangun sinergitas dalam pelaksanaan program pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura (misalnya Program Nasional PJAS, GKPD dan PPABK) adalah belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Adanya tumpang tindih kebijakan, belum adanya alokasi sumber daya anggaran yang disebabkan tiap instansi memiliki prioritas kelembagaannya sendiri-sendiri (Ketidaksinkronan prioritas antar sektor). Hal ini mungkin terjadi karena komunikasi yang tidak efektif antara berbagai pihak yang terlibat, sehingga program-program strategis yang membutuhkan kolaborasi multisektoral sering kali tidak disusun dan berjalan sesuai dengan rencana. Sebagaimana Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan.

Sampai dengan tahun 2024, Tim Koordinasi baru terbentuk sebanyak 10 pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (55,5%). Data ini menunjukkan pada tingkat daerah belum memiliki koordinasi yang kuat dan berpotensi meningkatkan peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan sehingga dapat mengancam kesehatan masyarakat di Indonesia. Selain itu, belum ada mekanisme evaluasi bersama yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan di daerah menyebabkan kelemahan ini belum dapat diselesaikan dengan baik. Perlu disusun strategi bersama untuk memastikan koordinasi lintas sektor

berjalan efektif demi kepentingan pengawasan Obat dan Makanan serta perlindungan kesehatan masyarakat

I.2.3 Peluang (*Opportunity*)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi Balai Besar POM di Jayapura untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Jayapura untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan:

1. Tuntutan/Ekspektasi yang tinggi stakeholder terhadap kinerja BPOM

Balai Besar POM di Jayapura memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas dan keamanan produk obat dan makanan yang beredar di wilayah Papua. Seiring dengan perkembangan ekonomi, peningkatan jumlah penduduk, serta dinamika perdagangan di kawasan tersebut, muncul kebutuhan yang semakin besar dari masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk memastikan produk yang dikonsumsi aman dan bermutu sesuai dengan standar. Harapan besar dari stakeholder dalam hal ini lintas sektor, masyarakat dan pelaku usaha terhadap kinerja Balai Besar POM di Jayapura menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Dengan merespons tuntutan tersebut secara strategis, Balai Besar POM di Jayapura dapat memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan kolaborasi, dan mendorong inovasi dalam pengawasan.

Papua adalah wilayah yang luas dan memiliki tantangan geografis, dengan banyak daerah yang sulit dijangkau. Hal ini membuat pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan menjadi lebih kompleks dan memerlukan koordinasi yang baik antara Balai Besar POM di Jayapura dengan berbagai pihak terkait. Stakeholder, baik dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga industri, sering menuntut kinerja yang cepat dan efisien untuk mengatasi tantangan ini. Dengan semakin banyaknya produk yang masuk dari luar daerah, tantangan bagi Balai Besar POM di Jayapura adalah memastikan produk yang sampai di Papua aman untuk dikonsumsi. Masyarakat dan stakeholder lainnya, seperti

pemerintah daerah dan industri kesehatan, tentu menuntut adanya pengawasan yang ketat terkait kualitas dan keamanannya

Stakeholder juga menuntut agar Balai Besar POM di Jayapura tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai instansi yang memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih produk obat dan makanan yang aman. Edukasi ini sangat krusial mengingat banyaknya produk ilegal atau yang tidak memenuhi standar yang beredar di pasar.

Pengawasan yang efektif tidak bisa dilakukan secara sendiri oleh Balai Besar POM di Jayapura. Oleh karena itu, ada tuntutan untuk memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, lembaga pendidikan, maupun sektor swasta, dalam rangka menciptakan ekosistem yang aman dan sehat terkait dengan obat dan makanan

2. Dukungan stakeholder dan supra sistem

Pemerintah pusat melalui Badan POM (BPOM) memiliki peran strategis dalam memberikan arahan kebijakan, anggaran, serta pengawasan terhadap kinerja UPT di seluruh Indonesia. Beberapa bentuk dukungan dari suprasistem ini, antara lain penguatan regulasi dan kebijakan, penyediaan sumber daya, sinergi program dan kegiatan.

Pemerintah Daerah Provinsi Papua yang memiliki peran penting dalam mendukung operasional Balai Besar POM di Jayapura. Beberapa bentuk dukungan dari pemerintah daerah antara lain koordinasi dalam pengawasan obat dan makanan termasuk memfasilitasi akses ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Ini sangat penting mengingat wilayah Papua yang memiliki topografi yang beragam dan memerlukan pendekatan khusus. Pemerintah daerah dapat memberikan informasi (penyediaan data dan informasi lokal) terkait masalah kesehatan lokal, isu peredaran obat terlarang, atau produk pangan yang berisiko, sehingga Balai Besar POM di Jayapura dapat merancang pengawasan yang lebih efektif sesuai dengan kondisi spesifik wilayah.

Dukungan dari masyarakat sangat penting, baik dalam hal partisipasi aktif dalam melaporkan temuan produk obat dan makanan yang tidak sesuai standar maupun dalam hal kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang potensi bahaya obat atau makanan ilegal dapat melaporkan temuan mereka kepada Balai Besar POM di Jayapura. Edukasi

masyarakat mengenai pentingnya peran Balai Besar POM di Jayapura dalam pengawasan produk juga membantu meningkatkan kesadaran dan dukungan publik. Keberhasilan Balai Besar POM di Jayapura juga tergantung pada seberapa besar dukungan masyarakat terhadap program edukasi yang dilakukan, seperti sosialisasi mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman serta cara melaporkan produk yang mencurigakan.

Pada sektor swasta, terutama industri makanan dan farmasi memainkan peran yang signifikan dalam mendukung tugas Balai Besar POM di Jayapura. Dukungan yang dapat diberikan antara lain kepatuhan terhadap regulasi yaitu perusahaan-perusahaan di sektor obat dan makanan harus mematuhi regulasi yang dikeluarkan oleh BPOM, termasuk dalam hal produksi, distribusi, dan pelabelan produk. Kepatuhan ini mempermudah tugas Balai Besar POM di Jayapura dalam melakukan pengawasan. Pada lembaga pendidikan dan penelitian memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, riset, dan edukasi terkait obat dan makanan.

Pada media massa, baik cetak maupun digital memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang transparan dan akurat terkait dengan keamanan obat dan makanan. Dukungan yang diberikan antara lain edukasi publik membantu memperluas jangkauan informasi terkait bahaya obat atau makanan ilegal dan pentingnya pengawasan oleh Balai Besar POM di Jayapura. Selain itu, media juga bisa berperan dalam memberikan sorotan terhadap temuan-temuan produk yang tidak aman, sehingga mendorong tindakan yang lebih cepat dan tepat dari Balai Besar POM di Jayapura.

Secara keseluruhan, dukungan yang diberikan oleh stakeholder dan suprasistem sangat krusial untuk memperkuat kapasitas Balai Besar POM dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mengingat pentingnya pengawasan produk obat dan makanan untuk kesehatan masyarakat, khususnya di Papua yang memiliki tantangan geografis dan sosial yang unik

3. Kerja Sama yang Baik dengan *Stakeholder*

Kesediaan untuk bekerja dan berpartisipasi aktif dari pihak *stakeholder* dalam pelaksanaan KIE, program PJAS, GKPD, PPABK pada level teknis di tingkat pemerintah kabupaten/kota menjadi peluang besar bagi Balai Besar POM di

Jayapura untuk memperluas jangkauan pengawasan dan edukasi. Kerjasama ini memungkinkan terlaksananya kegiatan berjalan lancar bahkan mampu mengembangkan program-program kolaboratif yang inovatif (KIE oleh talent lokal/Kader Keamanan Pangan) dan pelaksanaan kampanye edukasi tentang keamanan Obat dan Makanan secara lebih masif. Dengan pendekatan ini, BBPOM di Jayapura tidak hanya memastikan produk yang beredar sesuai standar, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat untuk menjadi konsumen yang lebih cerdas dan kritis.

4. Pertumbuhan UMKM

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup tinggi di Papua, termasuk di Jayapura, memberikan berbagai peluang bagi kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura. UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian lokal, dan banyak di antaranya bergerak di sektor makanan, minuman, obat-obatan, serta kosmetik, yang semuanya menjadi tanggung jawab pengawasan BPOM.

Pertumbuhan UMKM yang cukup tinggi dapat menjadi peluang bagi kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura dalam hal:

a. Memastikan Legalitas dan Peningkatan Kualitas Produk UMKM Melalui Pendampingan dan Pembinaan.

Pendampingan dan pembinaan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk UMKM dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu sosialisasi dan bimtek, pendampingan teknis dan *coaching clinic*.

Materi sosialisasi berupa regulasi terkait standar keamanan dan mutu produk serta tata cara sertifikasi dan registrasi produk, adapun materi bimtek lebih mengarah pada materi - materi teknis yang terkait dengan cara produksi yang baik. Sosialisasi dan bimtek yang dilaksanakan nantinya akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman UMKM terkait regulasi yang berlaku dan aspek-aspek yang perlu dipenuhi untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman.

Pendampingan teknis berupa pendampingan secara langsung maupun tidak langsung kepada UMKM dalam hal pemenuhan persyaratan - persyaratan yang diperlukan dalam proses sertifikasi sarana produksi maupun registrasi produk. Pendampingan teknis ini dilakukan untuk memastikan

pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh UMKM melalui sosialisasi dan bimtek diterapkan dengan benar oleh UMKM dalam praktek proses produksinya sehingga dihasilkan produk yang terjamin mutu dan keamanannya.

- b. Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Pesatnya pertumbuhan UMKM tidak hanya memunculkan pelaku usaha baru tapi juga menghadirkan potensi - potensi produk unggulan lokal Papua yang belum banyak disentuh. Diantara produk unggulan lokal Papua adalah sagu dan produk turunannya, minyak buah merah, produk olahan ikan, kopi, minyak kayu putih, dan lain sebagainya. Melalui serangkaian kegiatan pendampingan yang dilakukan BBPOM di Jayapura produk - produk UMKM termasuk produk unggulan lokal Papua akan memiliki daya saing yang meningkat di pasaran tidak hanya di pasar lokal Papua tapi juga dapat merambah ke pasar Nasional bahkan Internasional. Hal ini bukanlah hal yang mustahil dengan produk yang sudah terjamin mutu dan keamanannya yang dibuktikan dengan Nomor Izin Edar (NIE) yang terbit melalui serangkaian proses sertifikasi dan registrasi dengan melibatkan tahapan evaluasi dan verifikasi yang ketat akan meningkatkan kepercayaan diri UMKM untuk berani bersaing di pasaran. Disisi lain konsumen akan lebih mempercayai produk yang telah memiliki izin edar yang sudah bisa dipastikan jaminan mutu dan keamanannya.

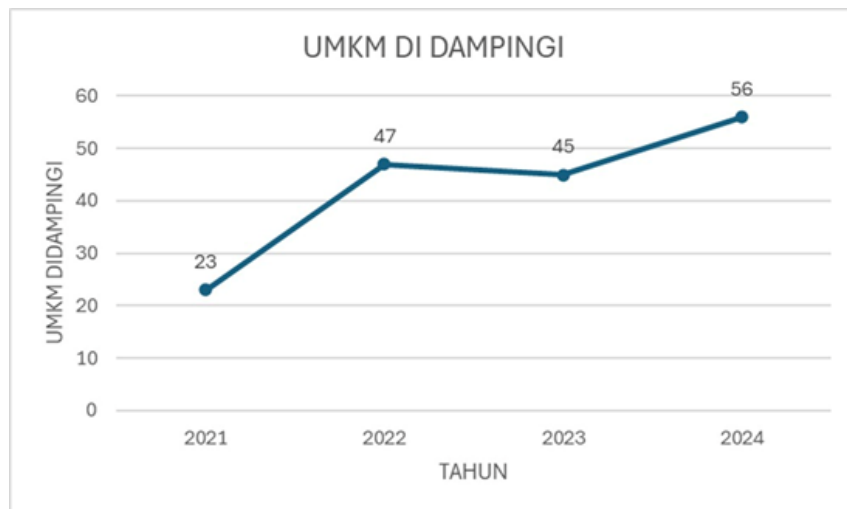
Meningkatnya daya saing produk UMKM di pasaran secara tidak langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Produk yang memiliki daya saing di pasaran dan diminati oleh konsumen akan meningkatkan perekonomian UMKM itu sendiri, bukan hanya UMKM yang meningkat perekonomiannya tapi juga karyawan dari UMKM tersebut, pemasok bahan baku, dan setiap unsur yang terlibat baik pada rantai produksi maupun rantai distribusi dari produk UMKM tersebut serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitarnya. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.

- c. Mengurangi Peredaran Produk Ilegal dan Berbahaya
Pertumbuhan UMKM yang pesat juga meningkatkan potensi munculnya

produk ilegal atau yang tidak memenuhi standar kesehatan. Hal ini terjadi antara lain dikarenakan kurangnya pengetahuan UMKM terkait regulasi dibidang keamanan obat dan makanan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura berperan dalam mengawasi dan memastikan bahwa produk-produk dari UMKM memenuhi standar mutu dan keamanan serta terdaftar secara sah. Pengawasan dilakukan terhadap peredaran produk di pasaran. Terhadap produk yang ditemukan tidak memenuhi standar mutu dan keamanan atau tidak terdaftar dilakukan upaya pembinaan dan pendampingan kepada UMKM yang memproduksi produk tersebut untuk memperbaiki mutu dan keamanan produknya dan melakukan proses registrasi produknya agar produknya memiliki legalitas untuk dapat beredar di pasaran.

Pertumbuhan UMKM yang cukup tinggi memberikan banyak peluang bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan dan pengembangan produk-produk lokal. Melalui pembinaan, pendampingan, kolaborasi, dan pengawasan yang lebih baik, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura dapat memastikan bahwa produk UMKM yang beredar aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Pada saat yang sama, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura juga dapat membantu meningkatkan daya saing UMKM, membuka pasar lebih luas, dan memperkuat perekonomian lokal dengan produk-produk yang lebih aman dan terjamin kualitasnya.

Balai Besar POM di Jayapura telah melakukan sertifikasi fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dengan melakukan pemeriksaan sarana produksi dan/atau distribusi obat dan makanan serta pendampingan UMKM melalui program SAGU EMAS Papua (Siap dAmpinGi UMKM Ekonomi Masyarakat Papua) yang secara intens telah dilakukan kepada pelaku usaha di beberapa kabupaten/kota antara lain: Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Keerom. Adapun tren pertumbuhan UMKM yang terus meningkat berdasarkan grafik dibawah ini.



Gambar 1. 33 Grafik Peningkatan Jumlah UMKM yang Telah Didampingi

I.2.4 Ancaman (*Threat*)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (*Threat*) yang dapat mempengaruhi Balai Besar POM di Jayapura dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang.

1. Pemangku kepentingan pada lingkungan strategis belum sepenuhnya memperhatikan nilai-nilai Integritas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBPOM di Jayapura seringkali menghadapi tekanan eksternal yang datang dari berbagai pihak. Tekanan ini dapat berupa tuntutan kepentingan, intervensi politik, praktik KKN maupun persaingan yang tidak sehat melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan peraturan organisasi.

Jika tidak dikendalikan dengan baik, hal ini akan menjadi ancaman serius terhadap penguatan nilai-nilai integritas organisasi dan akibatnya akan melemahkan kepercayaan publik, menurunkan reputasi, serta menghambat pencapaian tujuan strategis.

Dengan komitmen penerapan nilai-nilai integritas yang kuat serta pengawasan internal yang efektif BBPOM Jayapura akan mampu memastikan seluruh tata kelola dijalankan secara benar serta bebas dari penyimpangan.

BBPOM Jayapura telah membangun dan terus mengembangkan berbagai mekanisme untuk menjaga konsistensi penerapan integritas dalam praktik kerja sehari-hari serta mengupayakan keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam penerapan nilai-nilai integritas antara lain : mencantumkan pernyataan “petugas tidak diperkenankan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun” pada surat tugas; menyediakan saluran pelaporan bagi pemangku kepentingan untuk melaporkan indikasi penerimaan gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang oleh petugas; mekanisme penelaahan atas pelaporan dugaan pelanggaran integritas yang diterima; membentuk Tim Unit Pengendali Gratifikasi.

2. Perubahan pola hidup masyarakat terhadap konsumsi Obat dan Makanan

Pola hidup masyarakat yang berubah dapat menjadi ancaman bagi kinerja Balai Besar POM di Jayapura. Hal ini berkaitan dengan perubahan kebiasaan konsumsi, gaya hidup, dan preferensi masyarakat yang dapat mempengaruhi pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang beredar. Balai Besar POM di Jayapura, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memastikan produk-produk yang beredar aman, bermutu, dan sesuai dengan standar, menghadapi tantangan jika pola hidup masyarakat tidak mendukung prinsip-prinsip kesehatan.

Gaya hidup yang tidak sehat, seperti pola makan yang buruk, kurangnya olahraga, atau kebiasaan merokok, dapat meningkatkan ketergantungan pada produk obat-obatan atau suplemen. Masyarakat yang lebih bergantung pada obat-obatan atau suplemen untuk mengatasi masalah kesehatan dapat lebih mudah mengonsumsi produk yang tidak terdaftar atau yang tidak sesuai standar.

Perubahan pola hidup yang semakin konsumtif, mencari yang instan, cenderung mengutamakan kenyamanan tanpa memperhatikan aspek keamanan produk dapat mengarah pada konsumsi produk yang berisiko, tidak terdaftar atau ilegal, atau bahkan mengandung bahan berbahaya yang dapat menimbulkan risiko kesehatan, seperti obat-obatan, suplemen, atau kosmetik yang beredar di pasar tanpa izin dari BPOM.

Balai Besar POM di Jayapura perlu meningkatkan upaya penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya memilih produk yang terdaftar dan aman

dikonsumsi.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan e-commerce, perilaku konsumtif masyarakat semakin tinggi, dan cenderung membeli produk secara daring (online) tanpa memeriksa keabsahan atau keamanannya. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Balai Besar POM di Jayapura untuk mengawasi produk yang beredar, karena sebagian besar transaksi ini tidak melibatkan pemeriksaan fisik.

Pola hidup masyarakat yang semakin konsumtif, tidak sehat, atau dipengaruhi oleh tren media sosial dapat menjadi ancaman serius bagi kinerja Balai Besar POM di Jayapura. Masyarakat yang lebih cenderung memilih produk berdasarkan kemudahan, harga murah, atau popularitas tanpa memperhatikan standar keamanan dapat memberi peluang bagi peredaran produk ilegal, tidak terdaftar, atau berbahaya. Balai Besar POM di Jayapura harus lebih proaktif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, memperkuat pengawasan terhadap produk yang beredar (terutama yang dijual secara online), serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan produk yang beredar aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Perubahan pola hidup masyarakat yang semakin dinamis dengan meningkatnya konsumsi Obat dan Makanan instan serta produk-produk dengan bahan tambahan yang tidak terkontrol maupun pangan dengan kadar gula, garam, lemak (GGL) tinggi menjadi ancaman serius bagi pengawasan Balai Besar POM di Jayapura. Masyarakat yang cenderung mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh produk kesehatan dan pangan, sering kali tidak menyadari potensi bahaya yang terkandung dalam produk tersebut. Hal ini menambah tantangan bagi Balai Besar POM di Jayapura untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan kualitas.

3. Peningkatan produksi dan distribusi Obat dan Makanan

Peningkatan produksi dan distribusi obat dan makanan yang tidak terkontrol atau tidak sesuai dengan standar dapat menjadi ancaman serius bagi Balai Besar POM di Jayapura, baik dari segi pengawasan maupun perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Dalam menghadapi arus globalisasi dan semakin berkembangnya sektor industri obat dan makanan, Balai Besar POM di Jayapura menghadapi tantangan dalam mengawasi dan memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Peningkatan produksi dan distribusi yang tidak terkelola dengan baik bisa mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi kinerja Balai Besar POM di Jayapura.

Salah satu ancaman peningkatan produksi dan distribusi produk yang beredar adalah meningkatnya kemungkinan produksi dan distribusi obat dan makanan yang belum terdaftar atau ilegal, baik yang diproduksi secara lokal maupun yang berasal dari luar Papua. Hal ini menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Jayapura dalam melakukan pengawasan karena sulitnya memantau seluruh produk yang beredar, terutama yang diedarkan melalui jalur distribusi yang tidak resmi.

Dalam kondisi pasar yang semakin kompetitif, dapat mendorong produsen untuk menurunkan biaya produksi dengan cara mengurangi kualitas bahan baku, mengabaikan standar keamanan, atau bahkan menggunakan bahan-bahan berbahaya untuk menarik minat konsumen dengan harga yang lebih murah. Hal ini menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Jayapura dalam melakukan pengawasan dan memastikan bahwa produk yang beredar tidak membahayakan kesehatan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat, distribusi obat dan makanan kini tidak hanya terbatas pada sarana distribusi secara fisik, melainkan banyak produk yang kini didistribusikan melalui e-commerce, media sosial, dan jalur distribusi informal lainnya yang sulit diawasi oleh Balai Besar POM di Jayapura.

Wilayah Papua yang luas dan sulit dijangkau, memiliki tantangan geografis yang cukup signifikan bagi Balai Besar POM di Jayapura. Peningkatan distribusi produk, terutama di daerah terpencil, dapat membuat pengawasan obat dan

makanan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Jayapura menjadi lebih sulit dan kurang efektif.

Peningkatan jumlah produk yang beredar, baik yang legal maupun ilegal, mengharuskan Balai Besar POM di Jayapura memiliki sistem pengawasan yang mampu menghadapi tantangan distribusi melalui jalur tidak resmi, peredaran produk ilegal, dan klaim palsu. Balai Besar POM Jayapura juga harus terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan memperkuat upaya edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih produk yang terdaftar dan terjamin keamanannya. Penguatan pengawasan di seluruh jalur distribusi, baik secara tradisional maupun daring, menjadi kunci untuk mengatasi ancaman yang muncul akibat peningkatan produksi dan distribusi produk obat dan makanan.

4. Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan

Peningkatan jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan merupakan ancaman serius bagi Balai Besar POM di Jayapura. Pelanggaran ini mencakup produksi, distribusi, dan pemasaran produk ilegal, tidak terdaftar, atau mengandung bahan berbahaya. Ancaman ini berdampak pada kesehatan masyarakat, menurunkan kepercayaan publik, dan merusak reputasi Balai Besar POM di Jayapura. Faktor-faktor yang memperburuk situasi ini meliputi keterbatasan sumber daya, kesulitan pengawasan, dan ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap regulasi. Oleh karena itu, Balai Besar POM di Jayapura harus meningkatkan upaya pengawasan, penegakan hukum, dan kerjasama dengan lembaga terkait untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mempertahankan kepercayaan publik.

5. Perkembangan Teknologi di bidang Obat dan Makanan

Perkembangan teknologi di bidang obat dan makanan membawa dampak signifikan bagi industri kesehatan dan pangan, menciptakan inovasi-inovasi baru yang meningkatkan kualitas dan efisiensi produk namun di balik kemajuan tersebut, ada sejumlah tantangan serius yang dapat menjadi ancaman bagi kinerja Balai Besar POM di Jayapura, khususnya terkait dengan kemampuan lembaga ini dalam mengawasi dan memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar yang ditetapkan. Meskipun teknologi dapat mendukung proses produksi yang lebih efisien dan aman, ada sejumlah faktor

yang menjadikannya sebagai ancaman bagi pengawasan, yang dapat mempengaruhi efektivitas tugas Balai Besar POM di Jayapura dalam menjaga keamanan obat dan makanan bagi masyarakat Papua. Perkembangan teknologi telah memungkinkan pembuatan obat dan makanan sintesis yang lebih canggih dan sulit untuk dideteksi oleh alat uji konvensional. Misalnya, teknologi baru dalam rekayasa genetika, bioteknologi, dan nanoteknologi memungkinkan pembuatan produk-produk yang sangat mirip dengan produk alami atau yang memiliki bentuk yang tidak biasa, namun berpotensi berbahaya bagi kesehatan. Pesatnya pertumbuhan e-commerce yang menyediakan akses mudah bagi masyarakat untuk membeli obat dan makanan, termasuk yang tidak terdaftar atau tidak memenuhi standar. Produk-produk ilegal, baik itu obat-obatan, suplemen kesehatan, atau makanan yang tidak memiliki izin edar, dapat dengan mudah dijual melalui platform online. Balai Besar POM di Jayapura menghadapi tantangan besar dalam mengawasi dan mengontrol peredaran produk ilegal ini, terutama karena banyak transaksi terjadi secara online dan terkadang melibatkan pihak luar daerah, bahkan luar negeri. Sistem yang ada untuk mengawasi peredaran produk secara fisik di pasar tradisional atau modern tidak sepenuhnya efektif dalam memantau perdagangan melalui e-commerce, yang sering kali sulit dilacak dan tidak terikat oleh batasan geografis.

Perkembangan teknologi tidak hanya digunakan untuk menghasilkan produk yang lebih baik, tetapi juga dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam industri obat dan makanan untuk mengakali sistem pengawasan. Teknologi modern, seperti pemalsuan label, rekayasa produk yang menyerupai produk legal, atau penggunaan bahan tambahan yang tidak terdaftar, dapat sangat menyulitkan bagi Balai Besar POM untuk mendeteksi dan menghentikan peredaran produk ilegal. Dengan semakin banyaknya produk obat dan makanan yang berbasis data atau smart technology seperti obat yang dilengkapi dengan sensor untuk pemantauan kesehatan atau makanan yang dapat terhubung dengan aplikasi untuk pemantauan status gizi maka Balai Besar POM di Jayapura perlu memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mengawasi produk-produk tersebut.

Produk-produk berbasis data ini tidak hanya memerlukan pengawasan fisik,

tetapi juga pemantauan digital yang memadai. Balai Besar POM di Jayapura harus beradaptasi dengan tren baru dalam teknologi berbasis data ini agar dapat memantau keamanannya, namun hal tersebut memerlukan pengetahuan teknis yang lebih mendalam serta sumber daya untuk mengelola dan melakukan verifikasi data yang masuk. Ketidaksiapan untuk mengelola tantangan baru ini bisa menyebabkan pengawasan yang kurang optimal terhadap produk-produk yang menggunakan teknologi ini.

Dalam menghadapi tantangan ini, Balai Besar POM di Jayapura perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta melakukan inovasi dalam sistem pengawasan. Selain itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta untuk memastikan pengawasan yang lebih efektif dan menyeluruh, guna menjaga keamanan produk obat dan makanan yang beredar di Papua.

6. Kondisi Geografis dan Kamtibmas

Papua memiliki wilayah yang luas dan topografi yang sangat beragam mulai dari pegunungan, dataran tinggi, hingga pesisir pantai. Hal ini menyulitkan transportasi dan akses ke daerah-daerah terpencil. Wilayah yang luas ini membuat jangkauan pengawasan lebih besar, hal ini menjadi tantangan tersendiri.

Kondisi geografis dan keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua menjadi kelemahan bagi Balai Besar POM di Jayapura dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya karena berbagai tantangan fisik, sosial, dan keamanan yang signifikan. Hal ini menyulitkan karena terbatasnya transportasi dan akses ke daerah-daerah terpencil. Adanya keterbatasan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi yang belum memadai menghambat mobilisasi Balai Besar POM di Jayapura dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan. Banyak wilayah hanya dapat diakses melalui transportasi udara, sehingga memerlukan biaya tinggi serta adanya tantangan risiko cuaca ekstrem. Akses terbatas ini mengakibatkan program dan layanan Balai Besar POM di Jayapura sering kali hanya menjangkau wilayah perkotaan atau daerah yang mudah diakses, sehingga masyarakat di pedalaman kurang mendapatkan manfaat.

Adanya ancaman konflik bersenjata dari kelompok separatis, seperti

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sering menghambat pelaksanaan tugas Balai Besar POM di Jayapura, terutama di daerah rawan konflik. Demikian juga adanya ketegangan antara pendatang dan masyarakat lokal, serta masalah hak ulayat, juga memicu konflik yang menghambat pelaksanaan program. Hal ini memberikan rasa tidak aman bagi petugas sehingga enggan bertugas di wilayah yang dianggap berisiko tinggi. Keterbatasan jaringan telekomunikasi di beberapa wilayah yang ada di Papua masih minim akses internet dan telepon, sehingga menyulitkan koordinasi lintas wilayah, memperlambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan program di lapangan. Papua juga memiliki ratusan suku dengan bahasa dan adat istiadat berbeda, yang memerlukan pendekatan khusus dalam pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan. Kondisi geografis yang sulit di Provinsi Papua menjadi salah satu kelemahan dalam upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan penyebaran Informasi dan KIE. Pada beberapa kabupaten wilayah pegunungan kegiatan KIE tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh karena biaya transportasi yang sangat mahal, bahkan tidak mempunyai akses transportasi reguler. Pada daerah lainnya infrastruktur komunikasi yang tersedia masih sangat minim sehingga alternatif KIE melalui daring atau media sosial juga tidak dapat dilakukan, dampaknya masyarakat yang tinggal di daerah-daerah tersebut tidak dapat mengakses informasi edukasi yang disampaikan melalui media online. Hal ini memperlebar kesenjangan pengetahuan/informasi tentang Obat dan Makanan yang Aman. Selain itu, kondisi kamtibmas yang kurang kondusif di beberapa wilayah Papua juga menjadi hambatan signifikan. Konflik sosial, gangguan keamanan, dan ketegangan antar kelompok masyarakat maupun dengan pihak pemerintah sering kali menghambat pelaksanaan program-program Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Jayapura. Situasi ini sering kali menyebabkan dibatalkannya kegiatan yang telah direncanakan pada daerah tersebut dan dialihkan ke daerah yang aman (terjadi kegiatan berulang pada daerah yang kondusif).

Papua memiliki kerawanan keamanan yang terkadang mengalami ketegangan dan konflik sosial yang dapat mempengaruhi situasi ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Kondisi ini dapat berdampak pada kelancaran pengawasan dan penegakan regulasi obat dan makanan oleh Balai Besar POM di Jayapura. Selain

itu, dengan adanya masalah keamanan yang kurang kondusif dan kondisi geografis yang sulit dijangkau di beberapa wilayah menjadi ancaman yang memperlambat bahkan membatasi pelaksanaan KIE dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat karena masyarakat tidak terpapar akan informasi dan edukasi tentang obat dan makanan yang Aman.

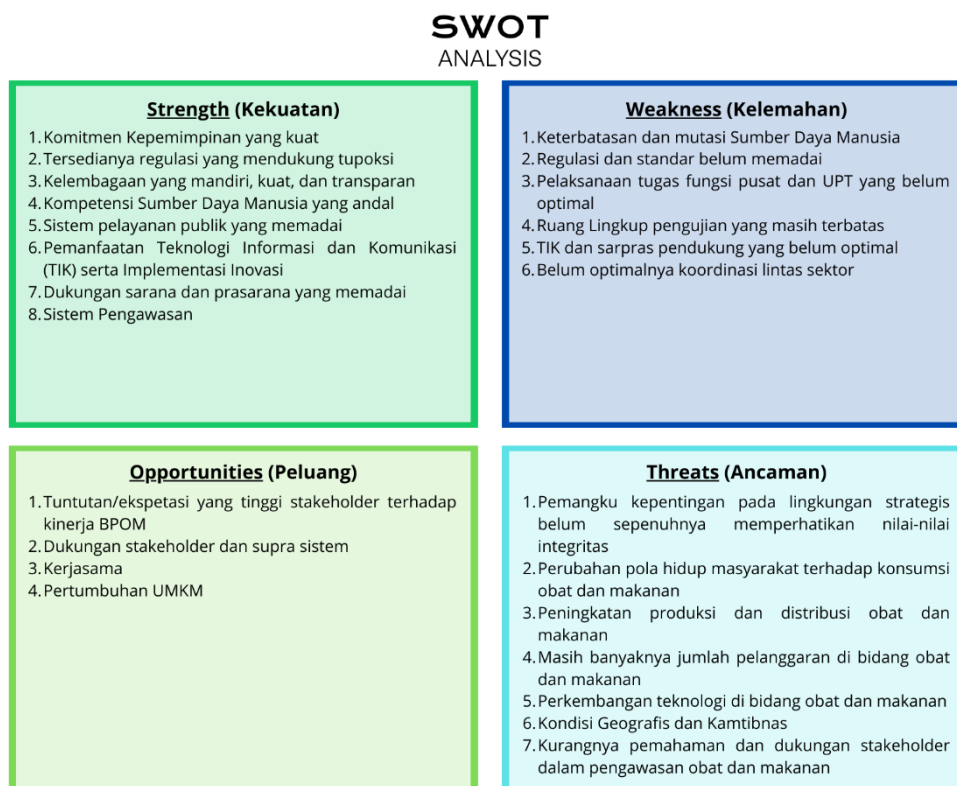
Dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan Kamtibmas, BBPOM di Jayapura dapat menyusun strategi pengawasan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan yang ada, serta memastikan pelaksanaan program pengawasan yang lebih efektif dan efisien.

7. Kurangnya pemahaman dan dukungan stakeholders dalam pengawasan obat dan makanan

Kurangnya pemahaman dan kesadaran dari sebagian stakeholder, seperti perangkat desa, produsen, pedagang di pasar, dan konsumen, juga merupakan ancaman yang signifikan dalam pengawasan Obat dan Makanan. Mereka mungkin belum memahami pentingnya mematuhi keamanan pangan yang lebih ketat terkait keamanan pangan dan obat. Tanpa adanya pemahaman dan kesadaran yang menyeluruh, pengawasan akan menjadi terhambat, bahkan berisiko menurunkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan edukasi dan kolaborasi yang lebih intensif dengan stakeholder agar pengawasan dapat berjalan efektif.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Balai Besar POM di Jayapura adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku industri terhadap pentingnya pengawasan obat dan makanan. Banyak masyarakat di daerah ini yang belum sepenuhnya menyadari risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh obat dan makanan yang tidak terjamin kualitasnya. Hal ini menyebabkan rendahnya kesadaran untuk melaporkan produk yang mencurigakan atau yang tidak memenuhi standar, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan peredaran barang ilegal. Selain keterbatasan pemahaman masyarakat dan pelaku industri, Balai Besar POM Jayapura juga menghadapi masalah terkait kurangnya dukungan dari pemerintah daerah. Pengawasan terhadap obat dan makanan bukan hanya tugas Balai Besar POM di Jayapura semata, tetapi memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk

pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan instansi terkait lainnya. Namun, keterbatasan alokasi anggaran dan sumber daya untuk pengawasan, serta tidak adanya kebijakan daerah yang mendukung secara maksimal, menghambat efektivitas pelaksanaan tugas Balai Besar POM di Jayapura . Regulasi yang tidak didukung dengan penegakan yang kuat, pemahaman dan dukungan dari stakeholders tidak hanya terbatas pada aspek pendidikan, tetapi juga pada penegakan hukum yang tegas. Regulasi yang ada terkait pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia sudah cukup baik, namun seringkali implementasi di lapangan tidak didukung dengan penegakan yang kuat. Misalnya, tindakan preventif atau penindakan terhadap pelanggaran seringkali terhambat oleh kurangnya koordinasi antara Balai Besar POM dan aparat penegak hukum di tingkat daerah. Tanpa adanya dukungan yang cukup dalam hal penegakan hukum, produk yang melanggar standar atau bahkan berbahaya tetap dapat lolos dari pengawasan dan tetap beredar di pasar.



Gambar 1. 34 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN BALAI BESAR POM DI JAYAPURA

2.1 Visi

Balai Besar POM di Jayapura sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggungjawab dalam Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Jayapura dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut :

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti

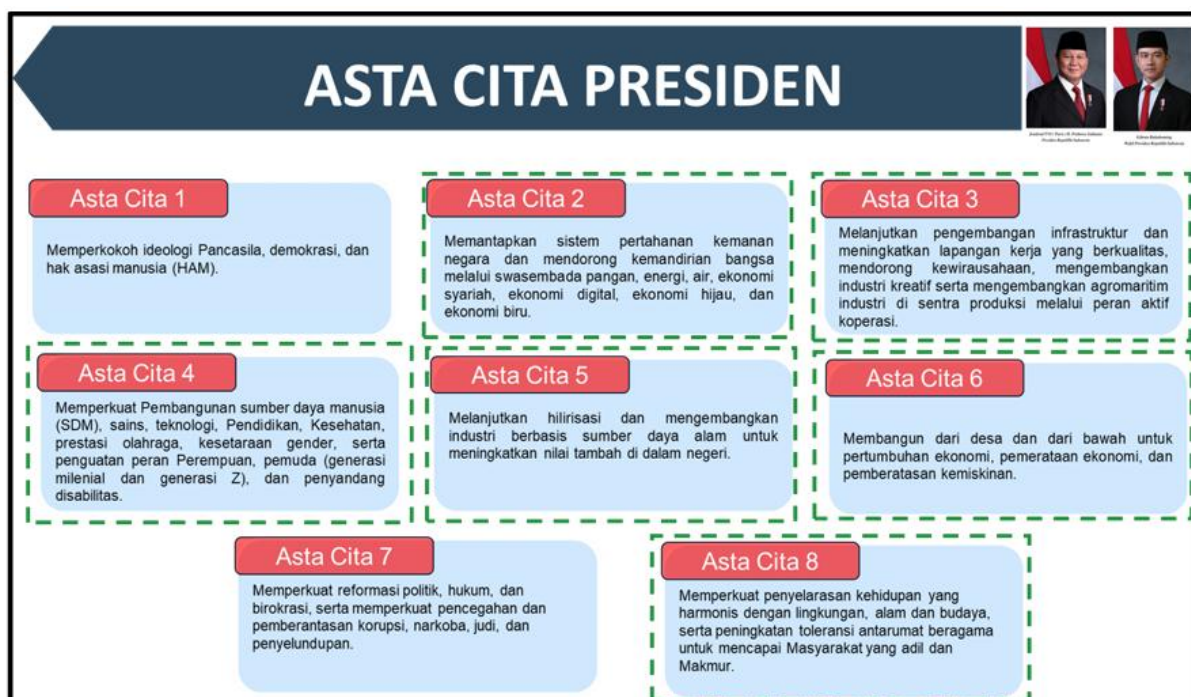
peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. **Masyarakat Sehat dan sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2 Misi BPOM

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2. 1 Misi Presiden (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) , dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai Besar POM di Jayapura sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.

2.3 Tujuan BPOM

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

Balai Besar POM di Jayapura sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM.

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan

farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana

tercantum pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu	Persentase sediaan farmasi dan pangan olahan (termasuk) PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.74	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.2	88.6	88.9	89.2	89.4
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan ukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks penguatan daya saing dan kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4	Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	indeks efektivitas penegakan hukum kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya organisasi yang profesional, Adaptif, Efektif, dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

2.4 Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Jayapura

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh Balai Besar POM di Jayapura, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Balai Besar POM di Jayapura telah merumuskan sejumlah sasaran kegiatan untuk periode 2025 – 2029. Sasaran-sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan Balai Besar POM di Jayapura, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di sediaan farmasi dan pangan olahan. Berikut adalah sasaran kegiatan Balai Besar POM di Jayapura 2025 – 2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor obat dan makanan.

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai Besar POM di Jayapura, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Jayapura akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT:

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian,

pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

2. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat

kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu:

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos

yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT:

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT:

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

7. Layanan Publik UPT yang Prima:

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara

berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

8. Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal:.

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- b. Nilai AKIP UPT BPOM
- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Setiap sasaran kegiatan ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa Balai Besar POM di Jayapura dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

PEMETAAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN KEGIATAN, & INDIKATOR

Visi:

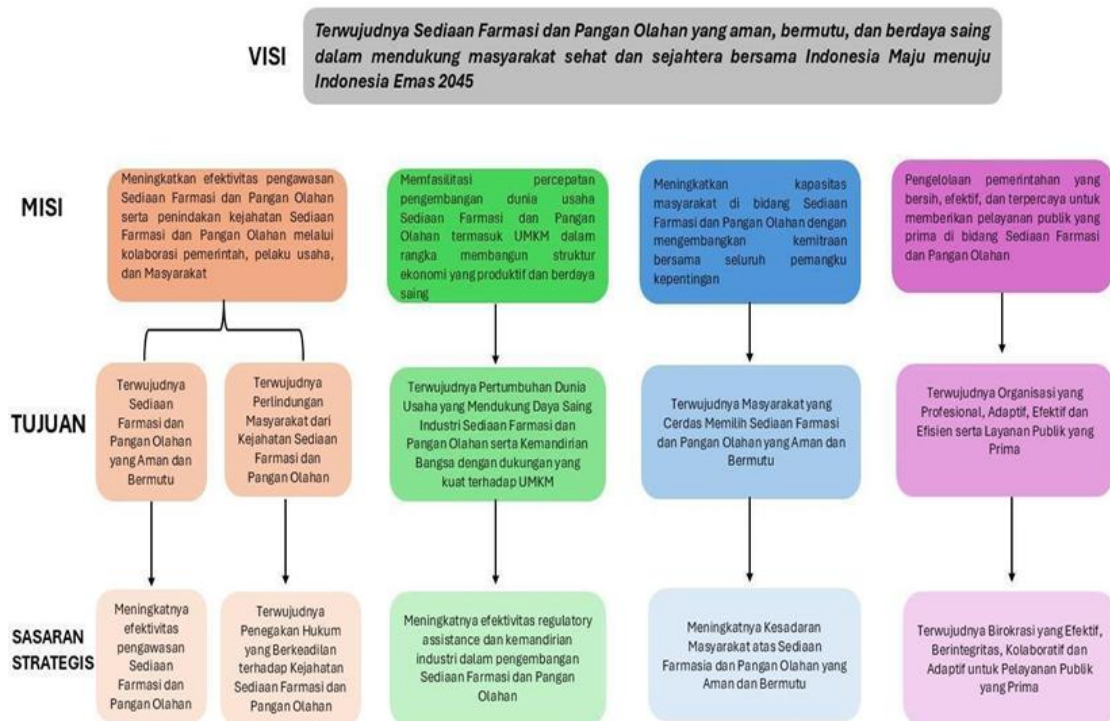
"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Tabel 2. 2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai Besar POM di Jayapura periode 2025-2029

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> 2. <i>Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> 3. <i>Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i> 4. <i>Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> 5. <i>Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> 6. <i>Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 2. <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> 3. <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 4. <i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i> 5. <i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 6. <i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i> 7. <i>Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 8. <i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 9. <i>Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 10. <i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 11. <i>Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi <i>Indikator:</i> Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
			Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator:</i> Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
produktif dan berdaya saing	<i>Indikator: Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	<i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator: 1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	Layanan Publik UPT yang prima <i>Indikator: Indeks Pelayanan Publik UPT</i> Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal <i>Indikator: 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM 5. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT 6. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar 7. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT</i>



Gambar 2. 2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan BPOM 2025-2029

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis BPOM 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran strategis tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan BPOM untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran strategis BPOM sebagaimana tercantum dalam tabel 4. Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Jayapura.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis BPOM 2025-2029 secara optimal, dilakukan identifikasi indikasi risiko dari setiap sasaran strategis.

Tabel 2. 3 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan BBPOM di Jayapura

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi perlakuan risiko	Indikasi PJ perlakuan
1	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	Waktu pengujian sampel masih melewati timeline. Jumlah alat tidak sebanding dengan jumlah sampel yang ada sehingga beban kerja alat menjadi berat.	Melakukan pemeliharaan dan perbaikan alat	Bidang Pengujian
		Waktu pengujian sampel DAK masih melewati timeline	Menyusun pembagian/perencanaan sampel rutin tiap bulan	Bidang Pengujian
		Adanya konflik kepentingan antara penguji dengan tersangka sehingga penguji menerima gratifikasi dari pihak tersangka	Penandatanganan Pakta Integritas dan membuat surat pernyataan benturan kepentingan	Bidang Pengujian
		Belum semua pengujian Parameter Uji Kritis dapat dikerjakan	1. Mengidentifikasi Parameter Uji yang ada di prioritas sampling, baku pembanding, reagen/media maupun suku cadang yang dibutuhkan untuk pengujian Parameter Uji Kritis 2. Pengadaan baku pembanding, reagen/media maupun suku cadang yang dibutuhkan untuk pengujian Parameter Uji Kritis	Bidang Pengujian

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi perlakuan risiko	Indikasi PJ perlakuan
		Pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar GLP belum berhasil memenuhi sasaran yang ditetapkan	1. Perencanaan pelatihan teknis (khususnya untuk CPNS) untuk meningkatkan kompetensi 2. Koordinasi dengan Tim Pemeriksaan terkait jenis sampel untuk pemenuhan Ruang Lingkup Pengujian	Bidang Pengujian
		Pemenuhan standar ruang lingkup (SRL) laboratorium pengujian Obat sesuai standar GLP belum berhasil memenuhi sasaran yang ditetapkan	Koordinasi dengan Tim Pemeriksaan BBPOM di Jayapura dan UPT BPOM lainnya yang masih dalam 1 region terkait jenis sampel untuk pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL) Pengujian	Bidang Pengujian
		Limbah pengujian mencemari lingkungan sekitar. Pengelolaan limbah yang belum maksimal karena tidak ada IPAL.	Pemilahan dan pengiriman limbah ke pihak ke 3 pengelola limbah.	Bidang Pengujian
		Kondisi keamanan di daerah tempat sampling tidak kondusif	a. Sampling dialihkan ke daerah lain yang lebih kondusif b. Sampling ditunda menyesuaikan situasi kondisi yang ada	Bidang Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi perlakuan risiko	Indikasi PJ perlakuan
		Ketidaksesuaian jenis kategori , jumlah, nomor bets, label , dan/atau Kesalahan penomoran sampel yang disampling	a. Rapat persiapan sampling & pembahasan teknis pelaksanaan sampling di lapangan b. Petugas sampling berkoordinasi dengan koordinator sampling tiap komoditi dan/atau staf laboratorium c. Diseminasi teknik/cara sampling dan juknis prioritas sampling	Bidang Pemeriksaan
		Kerusakan fisik sampel yang akan diuji	a. Membeli sampel baru untuk mengganti sampel yang rusak b. Petugas mengemas sampel dengan baik	Bidang Pemeriksaan
		Kesalahan penginputan data sampel di SIPT	a. Koordinator sampling mengecek kembali SIPT sampel sebelum dikirim ke supervisor b. Melakukan verifikasi bertingkat atas data yang diinput	Bidang Pemeriksaan
		Pelaksanaan Pemeriksaan sarana Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terkendala ketidakpastian Jadwal Penerbangan ataupun penundaan penerbangan karena kendala teknis akibat cuaca/ lainnya	a. Melakukan koordinasi dengan pihak maskapai dan melakukan reschedule penerbangan. b. Melakukan perubahan tujuan kegiatan pemeriksaan	Bidang Pemeriksaan
		Tindak lanjut terhadap produk yang diamankan dapat melebihi 14 hari kerja khususnya di daerah pegunungan/ daerah dengan akses transportasi yang sulit.	Melakukan koordinasi stakeholder dan melakukan perencanaan segera untuk kembali melakukan tindak lanjut ke Sarana.	Bidang Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi perlakuan risiko	Indikasi PJ perlakuan
		Inspeksi sarana produksi dan distribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi force majour (daerah tujuan pengawasan dalam kondisi tidak aman)	Dilakukan inspeksi secara online untuk sarana dengan tingkat pemenuhan tinggi dan onsite untuk sarana dengan tingkat pemenuhan rendah dengan tetap mempertimbangkan risiko lingkungan	Bidang Pemeriksaan
		Pemeriksaan tidak dilakukan secara detail	a. Pembaruan data kompetensi petugas b. Peningkatan kompetensi petugas baru dan refreshing kompetensi untuk petugas lama c. Melakukan evaluasi hasil Tindak Lanjut secara bertingkat	Bidang Pemeriksaan
		Pelaku usaha tidak kooperatif pada saat pemeriksaan	Peningkatan kompetensi petugas dalam berkomunikasi agar pelaku usaha memahami & menerima pelaksanaan pemeriksaan	Bidang Pemeriksaan
		Petugas yang tidak kompeten melakukan pemeriksaan sarana produksi/distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	a. Pembaruan data kompetensi petugas b. Peningkatan kompetensi petugas baru dan refreshing kompetensi untuk petugas lama	Bidang Pemeriksaan
		Jumlah sampel yang dibeli tidak sesuai dengan pedoman sampling	Koordinasi antara petugas sampling dengan tim pengujian Balai Besar POM di Jayapura	Bidang Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi perlakuan risiko	Indikasi PJ perlakuan
		Jenis sampel yang dibeli tidak sesuai dengan pedoman sampling	Pengajuan perubahan proporsi target sampel ke kedeputan terkait	Bidang Pemeriksaan
		Tindak lanjut hasil pemeriksaan melebihi time line yang ditetapkan	a. Sosialisasi SOP pemeriksaan sarana b. Pengaturan jadwal inspeksi	Bidang Pemeriksaan
		Tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak mendapatkan feedback dari sarana	a. Penyampaian informasi kepada sarana terperiksa atas pentingnya mengirimkan feedback hasil pemeriksaan. Sosialisasi dilakukan ketika petugas melakukan pemeriksaan b. Mencantumkan timeline pemenuhan CAPA pada surat tindak lanjut	Bidang Pemeriksaan
		Adanya konflik kepentingan antara petugas dan pemilik sarana	Adanya WBS, Lapor PACE, Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan	Bidang Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi perlakuan risiko	Indikasi PJ perlakuan
		Rencana pemeriksaan telah diketahui oleh pihak sarana	Pengendalian internal melalui sosialisasi kepada ASN agar tidak menginformasikan kegiatan pemeriksaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengendalian external: tidak menyampaikan secara detail target pemeriksaan sarana	Bidang Pemeriksaan
		Penyimpanan sediaan farmasi dan pangan olahan di sarana tidak sesuai dengan syarat penyimpanan produk	Kegiatan sampling dan pemeriksaan dilengkapi dengan termometer; Sosialisasi pemahaman penanganan produk sediaan farmasi dan pangan olahan kepada sarana	Bidang Pemeriksaan
		Terjadinya Kejadian Luar Biasa keracunan pangan pada saat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis	a. Melakukan pelatihan kepada pengelola kegiatan MBG di Kabupaten/Kota. b. Melakukan pemeriksaan ke sarana produksi dan distribusi yang terlibat dalam program MBG. c. Melakukan sampling terhadap makanan yang disediakan.	Bidang Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi perlakuan risiko	Indikasi PJ perlakuan
		Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi/tindak lanjut hasil pengawasan	a. Pendampingan pelaku usaha berupa desk dan Bimtek b. Pendampingan oleh petugas BPOM baik melalui pengawasan pre market maupun post market c. Pelatihan peningkatan kompetensi dan pemahaman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) terkini pada pelaku usaha d. Pemberian sanksi sesuai ketentuan berupa peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara kegiatan, dan rekomendasi pencabutan izin.	Bidang Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi perlakuan risiko	Indikasi PJ perlakuan
		Tidak semua rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	a. Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di daerah. b. Peningkatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemerintah daerah serta institusi lain di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. c. Pertemuan advokasi dan Bimtek Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan. d. Koordinasi bersama lintas sektor dan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan iklan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan e. Monitoring tindak lanjut kepada lintas sektor	Bidang Pemeriksaan
2	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing- masing	Peserta KIE mengisi survei efektifitas KIE secara manual dikarenakan jaringan internet ditempat pelaksanaan KIE tidak bagus dan pemahaman peserta terhadap penggunaan teknologi terbatas.	Petugas menginput hasil survey manual menggunakan link survey	Bidang Infokom

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi perlakuan risiko	Indikasi PJ perlakuan
		Pembuatan konten media sosial dalam bentuk video masih terbatas, kualitas dan kuantitas masih belum bisa konsisten	Membuat postingan media sosial dalam bentuk infografis maupun berita kegiatan	Bidang Infokom
3	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Pelaku usaha tidak melakukan tindak lanjut perbaikan sesuai timeline karena anggaran produksi terbatas.	Kolaborasi dengan lintas sektor terkait pendampingan dan edukasi bagi UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik terhadap pelaku usaha.	Bidang Pemeriksaan
4	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Proses Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti tidak dapat dilakukan (Tahap II Gagal). Barang Bukti hilang/Kurang.	Adanya petugas pengelolaan barang bukti dan ruang barang bukti dilengkapi cctv.	Bidang Penindakan
		Tersangka tidak kooperatif atau melarikan diri.	a. Tersangka diminta secara sukarela rutin terjadwal melakukan pelaporan kepada petugas. b. dilakukan penahanan untuk tersangka yang dianggap berpotensi melarikan diri	Bidang Penindakan
		Penyidik menerima suap/gratifikasi dari terduga/tersangka	Adanya WBS, Halo Pace, Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan, mekanisme penerimaan tamu	Bidang Penindakan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi perlakuan risiko	Indikasi PJ perlakuan
		Saat Penindakan tidak ditemukan barang bukti (Penindakan Gagal). Informasi intelijen dibocorkan oleh informan/pihak lain.	Pembentukan pembinaan jaringan (Tukbinjar)/Penambahan Biaya Akses Informasi, Pelatihan kepada petugas, Pemberian informasi target penindakan disampaikan saat menuju lokasi	Bidang Penindakan
		Terhambatnya proses penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	a. Pembangunan kesepahaman antara BPOM (PPNS), Kepolisian (Korwas PPNS), dan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum), dalam penanganan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. b. Koordinasi penanganan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Kejaksaan Agung/Tinggi/Negeri c. Peningkatan kompetensi PPNS BPOM dalam pelaksanaan penyidikan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara berkala.	Bidang Penindakan
		Saat Penindakan tidak ditemukan barang bukti (Penindakan Gagal) karena informasi intilijen dibocorkan oleh onforman atau pihak lain.	Pembentukan pembinaan jaringan (Tukbinjar)/Penambahan Biaya Akses Informasi, Pelatihan kepada petugas, Pemberian informasi target penindakan disampaikan saat menuju lokasi	Bidang Penindakan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi perlakuan risiko	Indikasi PJ perlakuan
		Petugas Intelijen sudah dikenali sebagai petugas BPOM.	Pemenuhan SDM Penindakan dan peningkatan kompetensi petugas intelijen	Bidang Penindakan
		Gagal terungkapnya pelanggaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait (CJS)	Bidang Penindakan
5	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Informan memberikan informasi intelijen kepada target, kurangnya pembentukan dan pembinaan jaringan (Tukbinjar) Informan oleh petugas intelijen.	Pembentukan pembinaan jaringan (Tukbinjar)/Biaya Akses Informasi	Bidang Penindakan
6	08 - Layanan Publik UPT yang prima	Petugas pelayanan publik menerima gratifikasi untuk mempercepat proses pelayanan.	BBPOM di Jayapura telah memiliki Standar Pelayanan Publik serta adanya saluran pelaporan langsung kepada Kepala BBPOM di Jayapura melalui WBS dan Halo Pace	Tata Usaha
		Nilai Self Assesment Pelayanan Kelompok Rentan rendah	Menggunakan sarana prasarana untuk pelanggan umum	Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi perlakuan risiko	Indikasi PJ perlakuan
7	09 -Terwujudnya tata kelola pemerintah	Banyak permohonan mutasi ke UPT di luar Papua atau ke pusat membuat jumlah pegawai berkurang dan tidak sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK), dan Beban kerja yang semakin tinggi.	a. Optimalisasi SDM yang ada dengan melakukan pembagian tugas yang merata berdasarkan prioritas dan kompetensi, mengadakan pelatihan bagi pegawai serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pekerjaan b. Membuat Analisis Beban Kerja (ABK) dan usulan pemenuhan kebutuhan pegawai	Tata Usaha
		Kinerja pegawai menurun	a. Penerapan Program Engagement dengan mengadakan kegiatan yang meningkatkan keterlibatan pegawai, seperti kegiatan olahraga bersama, rekreasi, atau kegiatan sosial lainnya. b. memberikan apresiasi kepada pegawai berupa penghargaan c. pendekatan personal atasan kepada pegawai untuk memahami kebutuhan atau masalah pegawai dan Memberikan umpan balik yang konstruktif dan motivasi untuk mendorong pencapaian kerja lebih baik.	Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi perlakuan risiko	Indikasi PJ perlakuan
		Adanya penerimaan gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang pegawai dalam pelaksanaan tugas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	a. Kebijakan antikorupsi antara lain pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan wbs/pengaduan Masyarakat. b. Monitoring dan evaluasi pelaporan Benturan Kepentingan, WBS, Pengaduan Masyarakat c. Sosialisasi Anti Fraud. d. Penguatan nilai-nilai anti penyuapan dalam kerangka kerja sitem manajemen pengawasan obat dan makanan	Tata Usaha
		Penilaian Kinerja tidak obyektif	a. Melaksanakan sosialisasi kebijakan kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan pemahaman dan akuntabilitas. b. Mengintegrasikan hasil penilaian kinerja dengan sistem penghargaan dan sanksi yang adil dan transparan. c. Melakukan komunikasi langsung dengan pegawai untuk memberikan umpan balik yang konstruktif mengenai hasil penilaian.	Tata Usaha
		Ketidakpatuhan terhadap aturan terkait kepegawaian, seperti penilaian kinerja SKP dan pelayanan kepegawaian lainnya	a. Mengadakan sosialisasi rutin terkait peraturan baru dan kebijakan yang berlaku. b. b. Membuat sistem dokumentasi digital untuk menyimpan semua regulasi yang relevan.	Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi perlakuan risiko	Indikasi PJ perlakuan
		a. Arsip Inaktif yang sudah habis retensi waktunya dan berketerangan musnah diusul musnahkan tetapi masih memiliki nilai guna b. terjadi penumpukan arsip yang seharusnya dimusnahkan tetapi belum diusulkan, begitupun sebaliknya arsip yang jadwal retensi waktunya sudah seharusnya dimusnahkan tetapi belum diusulkan c. kurangnya keamanan dan keselamatan arsip	a. Mengadakan/ mengikuti pelatihan/ workshop terkait kearsipan b. Mengusulkan DA musnah 1 tahun 2x c. beberapa arsip yang dinilai berguna, diarsipkan melalui elektronik/ discan	Tata Usaha
		Nilai Pengadaan yang besar memungkinkan untuk timbulnya hubungan saling menguntungkan	Melaksanakan Pengadaan tidak secara tatap muka dan memilih penyedia lebih dari satu penyedia	Tata Usaha
		Dokumen Pembayaran pengadaan barang/jasa belum lengkap	Melakukan check list dan pengecekan berulang atas kelengkapan dokumen	Tata Usaha
		Dokumen HPS dan Spesifikasi Teknis hanya mengarah kepada Penyedia tertentu	Melakukan perbandingan lebih dari satu penyedia dan menyusun HPS dan Spesifikasi Teknis secara general	Tata Usaha
		Barang/Jasa yang diterima tidak sesuai Pesanan	Melakukan pengecekan barang/jasa yang diterima sebelum melakukan proses pembayaran	Tata Usaha
		Perbedaan Jumlah aset/barang pada daftar DBR dan fisk barang di ruangan	ketika ada perpindahan barang /aset di ruangan, penanggungjawab ruangan mengisi link form perpindahan barang/aset	Tata Usaha
		Masih terdapat aset tidak dapat diusulkan pemeliharaan dalam RKBMN	Mengusulkan PSP terhadap aset/barang	Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi perlakuan risiko	Indikasi PJ perlakuan
		Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kurang optimal	Membuat perencanaan kebutuhan APD secara berkala dan memanfaatkan optimalisasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan	Tata Usaha
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tidak memenuhi target	a. Membuat perencanaan pengadaan secara cermat b. Melakukan proses pengadaan Pra DIPA c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala	Tata Usaha
		Persentase penyerapan anggaran tidak memenuhi target	a. Membuat perencanaan kegiatan secara cermat b. Melaksanakan kegiatan secara maksimal sesuai waktu yang ditentukan c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala	Tata Usaha
		Proses bisnis dilakukan tanpa memperhatikan dokumen mutu terkini	Membuat dokumen mutu lebih mudah di akses melalui inovasi BALIEM (Beranda Layanan Internal Dokumen Mutu)	Tata Usaha
		a. Kegiatan pengawasan obat dan makanan tidak optimal b. Tidak tersedianya sarana dan prasarana karena tidak ada belanja modal	a. Melakukan revisi anggaran sesuai yang telah ditetapkan oleh Kemenkeu dan Roren BPOM b. Melakukan revisi target dan output setiap kegiatan melalui koordinasi dengan unit pengampu	Tata Usaha

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat

menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.

5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat. Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 3. 1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama sektor.
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan,	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Jayapura

Balai Besar POM di Jayapura mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut :

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG.
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan Balai Besar POM di Jayapura 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Balai Besar POM di Jayapura sebagai salah satu UPT BPOM melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan di wilayah Papua, melakukan pengawasan sebelum dan selama produk obat dan makanan beredar untuk memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat dan makanan. Balai Besar POM di Jayapura juga melakukan pendampingan dan bimbingan kepada pelaku usaha untuk memastikan produk obat dan makanan yang diproduksi atau dihasilkan aman, berkhasiat dan bermutu hingga di tangan konsumen.
2. Memperkuat fungsi Penindakan dan pemeriksaan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama dengan lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi dari bagian Informasi dan komunikasi (Infokom) untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura.
6. Peningkatan SDM yang kompeten, profesional, berintegritas dan berdedikasi serta peningkatan kualitas pengujian laboratorium. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Implementasi Inovasi.
7. Petugas layanan publik yang kompeten dan berdedikasi tinggi serta memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan masyarakat. Sistem digitalisasi dalam pelayanan publik untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan dengan mudah.

Tabel 3. 2 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Jayapura 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Balai Besar POM di Jayapura sebagai salah satu UPT BPOM melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan di wilayah Papua, melakukan pengawasan sebelum dan selama produk obat dan makanan beredar untuk memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat dan makanan. Balai Besar POM di Jayapura juga melakukan pendampingan dan bimbingan kepada pelaku usaha untuk memastikan produk obat dan makanan yang diproduksi atau dihasilkan aman, berkhasiat dan bermutu hingga di tangan konsumen.
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Memperkuat fungsi Penindakan dan pemeriksaan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama dengan lintas sektor.
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi dari bagian Informasi dan komunikasi (Infokom) untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan SDM yang kompeten, profesional, berintegritas dan berdedikasi serta peningkatan kualitas pengujian laboratorium. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Implementasi Inovasi.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Petugas layanan publik yang kompeten dan berdedikasi tinggi serta memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan masyarakat. Sistem digitalisasi dalam pelayanan publik untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan dengan mudah.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Balai Besar POM di Jayapura juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Adapun kegiatan prioritas yang mendukung Arah Kebijakan dan Strategi tersebut,

sebagai berikut:

a. Kegiatan Prioritas Pada Program Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai Besar POM di Jayapura melaksanakan kegiatan "Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia". Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jayapura mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

b. Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana BPOM

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai (gaji) serta pemeliharaan rutin dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Balai Besar POM di Jayapura.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh BPOM untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan Balai Besar POM di Jayapura dalam memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran strategis yang mencerminkan visi BPOM, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Balai Besar POM di Jayapura selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama Balai Besar POM di Jayapura, yaitu memastikan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Matriks ini sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Tabel 4. 1 Matriks Kerangka Kinerja Balai Besar POM di Jayapura 2025-2029

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	91	92	93	94
		2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		3. Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		6. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>	90	91	92	93	94
		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91.5	92.5	94	95.5
		8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	92	94	96	98
		9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	95.13	96.25	97.38	98.50
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		11. Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.40	93.60	94.80	96	97.20
		12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang	91	92	93	94	95

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		diawasi sesuai standar					
		13.Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		14.Nilai pemenuhan laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70	75	79.2	80.9	82.4
		15.Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman	5.88	11.76	17.65	23.53	7
		16.Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81	82	83	84
2.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.69	88.56	89.44	90.32	91.19
		2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan Pangan	10	12	15	16	18
		3. Jumlah desa pangan aman	3	4	4	4	5
		4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	2	2	3	3
3.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	14.75	31.15	47.54	65.57	83.61
4.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	86	87	88	89

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
5.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan	90	91	92	93	94
6.	Layanan Publik UPT yang prima	1. Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70	4.75	4.80	4.85	4.90
7.	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.10	87.30	87.50	87.70	87.90
		2. Nilai AKIP UPT BPOM	77.17	77.67	78.17	78.67	79.17
		3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		4. Indeks Manajemen risiko UPT BPOM	3	3.07	3.14	3.24	3.34

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.

Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan BBPOM di Jayapura 2025-2029

Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	16.276,6	30.702,5	28.922,3	29.226,6	31.012,5
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	10.669,5	10.936,6	11.939,1	13.037,4	14.240,8
TOTAL	26.946,2	41.639,2	40.861,4	42.264,1	45.253,4

Tabel 4. 3 Tabel kerangka pendanaan BBPOM di Jayapura 2025-2029 Berdasarkan sumber dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	25.146,7	38.857,7	38.131,9	39.440,8	42.230,4
Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)	1.800	2.781,4	2.729,5	2.823,2	3.022,9
Total	26.946,7	41.639.226	40.861,4	42.264,1	45.253,4

Kerangka pendanaan tersebut disusun dengan memperhatikan tantangan pengawasan BPOM dalam kurun waktu 2025-2029 serta dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPOM yang ingin dicapai. Pada akhir 2025-2029, Balai Besar POM di Jayapura diharapkan mampu:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan bersama lintas sektor dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE guna mewujudkan masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu melalui program KASBI PAPUA
3. Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan anan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM melalui berbagai kegiatan pendampingan/pembinaan/regulatory assistance yang diberikan kepada pelaku usaha
4. Meningkatkan perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penyelenggaraan fungsi deteksi kejahatan dan penyidikan yang optimal.
5. Mewujudkan Balai Besar POM di Jayapura sebagai organisasi yang profesional, adaptif, efektif, efisien dan responsif serta memberikan pelayanan publik yang prima.

BAB V

PENUTUP

Renstra Balai Besar POM di Jayapura 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang selaras dengan amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Renstra Balai Besar POM di Jayapura 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di lingkungan Balai Besar POM di Jayapura baik untuk perencanaan menengah dan tahunan.

Renstra Balai Besar POM di Jayapura tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja di lingkungan Balai Besar POM di Jayapura sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. diharapkan semua fungsi/substansi dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan unit kerja sampai pada level individu.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Jayapura



Herianto Baan, S.Si., Apt

Lampiran I Matriks kinerja dan kerangka pendanaan Tahun 2025-2029

Kegiatan			Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output			Lokasi		Target					Alokasi					Unit organisasi pelaksana
													(Dalam Juta Rupiah)					
								2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar POM di Jayapura											28.668,7	41.639,2	40,861,4	42.264,1	45.253,4			
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia											16.276,6	27.065,4	26.559,9	27.471,6	29.414,7			
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT					Balai Besar POM di Jayapura												
	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan				Balai Besar POM di Jayapura	90	91	92	93	94						BBPOM di Jayapura	
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO				Balai Besar POM di Jayapura	26	27	28	29	30						BBPOM di Jayapura	
	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan				Balai Besar POM di Jayapura	91	92	93	94	95						BBPOM di Jayapura	
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar				Balai Besar POM di Jayapura	100	100	100	100	100						BBPOM di Jayapura	
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan				Balai Besar POM di Jayapura	91	92	93	94	95						BBPOM di Jayapura	
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder				Balai Besar POM di Jayapura	90	91	92	93	94						BBPOM di Jayapura	
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				Balai Besar POM di Jayapura	91	91.5	92.5	94	95.5						BBPOM di Jayapura	
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				Balai Besar POM di Jayapura	90	92	94	96	98						BBPOM di Jayapura	
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				Balai Besar POM di Jayapura	94	95.13	96.25	97.38	98.5						BBPOM di Jayapura	

Kegiatan			Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit organisasi pelaksana
										(Dalam Juta Rupiah)					
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar POM di Jayapura									28.668,7	41.639,2	40,861,4	42.264,1	45.253,4		
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Jayapura	91	92	93	94	95						BBPOM di Jayapura	
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Jayapura	92.4	93.6	94.8	96	97.2						BBPOM di Jayapura	
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Balai Besar POM di Jayapura	91	92	93	94	95						BBPOM di Jayapura	
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Balai Besar POM di Jayapura	100	100	100	100	100						BBPOM di Jayapura	
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Balai Besar POM di Jayapura	70	75	79.2	80.9	82.4						BBPOM di Jayapura	
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman	Balai Besar POM di Jayapura	5.88	11.76	17.65	23.53	29.41						BBPOM di Jayapura	
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Jayapura		81	82	83	84						BBPOM di Jayapura	
	RO 1: Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans			45	45	45	45	45							
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Balai Besar POM di Jayapura	423	423	427	428	430							
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			851	859	899	942	987							
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Balai Besar POM di Jayapura	22	25	27	31	33							

Kegiatan			Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit organisasi pelaksana
										(Dalam Juta Rupiah)					
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar POM di Jayapura									28.668,7	41.639,2	40,861,4	42.264,1	45.253,4		
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Balai Besar POM di Jayapura	551	589	634	684	742							
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		Balai Besar POM di Jayapura	204	204	204	216	216							
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		Balai Besar POM di Jayapura	1	1	1	1	1							
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Balai Besar POM di Jayapura	1	1	1	1	1							
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Balai Besar POM di Jayapura	1	1	1	1	1							
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		Balai Besar POM di Jayapura	340	340	340	340	340							
	Meningkatnya efektivitas KIE di masing- masing wilayah kerja UPT		Balai Besar POM di Jayapura											BBPOM di Jayapura	
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Balai Besar POM di Jayapura	87.69	88.56	89.44	90.32	91.19						BBPOM di Jayapura	
	2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Balai Besar POM di Jayapura	10	12	15	16	18						BBPOM di Jayapura	

Kegiatan			Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit organisasi pelaksana
										(Dalam Juta Rupiah)					
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar POM di Jayapura									28.668,7	41.639,2	40,861,4	42.264,1	45.253,4		
	3	Jumlah desa pangan aman	Balai Besar POM di Jayapura	3	4	4	4	5						BBPOM di Jayapura	
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Balai Besar POM di Jayapura	1	2	2	3	3						BBPOM di Jayapura	
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		Balai Besar POM di Jayapura	126	300	360	432	518						BBPOM di Jayapura	
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			23	13	14	15	16							
	RO 3: Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman			10	12	15	16	18							
	RO 4: Desa Pangan Aman			3	4	4	4	5							
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas			1	2	2	3	3							
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu		Balai Besar POM di Jayapura											BBPOM di Jayapura	
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Balai Besar POM di Jayapura	14.75	31.15	47.54	65.57	83.61						BBPOM di Jayapura	
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		Balai Besar POM di Jayapura	11	12	12	13	13						BBPOM di Jayapura	

Kegiatan		Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit organisasi pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar POM di Jayapura								28.668,7	41.639,2	40,861,4	42.264,1	45.253,4		
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Balai Besar POM di Jayapura	87.1	87.3	87.50	87.70	87.90						BBPOM di Jayapura
	2	Nilai AKIP UPT BPOM	Balai Besar POM di Jayapura	77.17	77.67	78.17	78.67	79.17						BBPOM di Jayapura
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Balai Besar POM di Jayapura	5	5	5	5	5						BBPOM di Jayapura
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Balai Besar POM di Jayapura	3	3.07	3.14	3.24	3.34						BBPOM di Jayapura
	RO 1:Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		Balai Besar POM di Jayapura	1	1	1	1	1						BBPOM di Jayapura
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluru Indonesia		Balai Besar POM di Jayapura	1	1	1	1	1						BBPOM di Jayapura
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		Balai Besar POM di Jayapura	1	1	1	1	1						BBPOM di Jayapura
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM									10.669,5	14.573,7	14.301,5	14.792,4	15.838,6	BBPOM di Jayapura
	RO 5: Layanan BMN Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		Balai Besar POM di Jayapura	1	1	1	1	1						BBPOM di Jayapura
	RO 6: Layanan Perkantoran Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah		Balai Besar POM di Jayapura	1	1	1	1	1						BBPOM di Jayapura

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



BALAI BESAR POM DI JAYAPURA
Jl. Otonom Kotaraja, Jayapura - Papua
Telp. (0967) 5186777, Fax. (0967) 5186333

